



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2022

**BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada ALLAH SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga kami dapat melaksanakan kegiatan penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Perangkat Daerah tahun 2022 dan sekaligus dapat menyelesaikan laporan pelaksanaan kegiatan yaitu Menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan dokumen ini mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta memperhatikan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah maka disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 ini diharapkan dapat memberikan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi, sehingga dapat memberikan kontribusi guna peningkatan kinerja pada periode berikutnya. Secara internal juga sebagai sarana evaluasi atas pencapaian kinerja sehingga dapat menjadi pemicu peningkatan kinerja organisasi dengan melakukan langkah-langkah perbaikan melalui pelayanan yang lebih profesional yang berguna bagi masyarakat. Sehingga laporan ini bermanfaat dan berguna untuk menunjang pembangunan dan perkembangan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Selatan.

Di Tetapkan di : Makassar
Pada Tanggal : Januari 2023
Kepala Badan,



Prof. Dr. Muhammad Iufri, M.Si, M.Psi, Psikolog

Pangkat : Pembina Utama Madya
NIP : 19680202 199403 1 009

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Struktur Organisasi BPSDM 2

1.3 Sumber Daya Manusia BPSDM 4

1.4 Issue Strategis..... 8

1.5 Cascading Kinerja..... 9

1.6 Ringkasan Hasil Evaluasi..... 11

BAB II PERENCANAAN KINERJA..... 12

2.1 Renstra 2018 – 2023..... 12

2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2022..... 13

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 21

3.1 Metode Pengukuran Kinerja Tahun 2022..... 21

3.2 Capaian IKU BPSDM Tahun 2022..... 22

3.3 Capaian Kinerja Organisasi..... 23

3.4 Perbandingan antara Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun Sebelumnya..... 28

3.5 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Target Jangka Menengah
yang terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis..... 29

3.6 Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan Atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja
Serta Alternative Solusi Yang Telah Dilakukan..... 29

3.7 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya..... 31

3.8 Analisis Program / Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan
Pencapaian Kinerja..... 32

3.9 Realisasi Anggaran 34

3.10 Tindak Lanjut Hasil Evaluasi..... 37

BAB IV PENUTUP..... 39

4.1 Kesimpulan 39

4.2 Saran 40

LAMPIRAN :

- **MATRIKS CAPAIAN REALISASI ANGGARAN DAN KINERJA TAHUN 2022**
- **PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022**



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
(BPSDM)**

Jl. Cendrawasi NO. 233 MAKASSAR, TLP/FAX (0411) 876223

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PROVINSI
SULAWESI SELATAN**

NOMOR : 18 / I / TAHUN 2023

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH DAN REFORMASI BIROKRASI
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PROVINSI SULAWESI SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

- Menimbang : a. bahwa akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi, yang dalam perjalanan pelaksanaannya memerlukan evaluasi secara berkala guna mewujudkan tercapainya target-target kinerja yang telah ditetapkan setiap tahunnya;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan evaluasi akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia maka dipandang perlu dibentuk Tim Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Reformasi Birokrasi yang terdiri dari Pengarah, Penanggungjawa, Ketua Tim, dan Anggota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Selatan tentang Pembentukan Tim Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Reformasi Birokrasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2023.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310) ;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 01 Tahun 2023 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;
16. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023;
17. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 09 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 Nomor 9);
18. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 07 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah;
19. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 01 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 Nomor 01);
20. Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 47/I/ Tahun 2023 tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat

Daerah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **Tim Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Reformasi Birokrasi Badan Pengembangan Sumber Daya manusia Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2023**

KESATU : Membentuk Tim Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Reformasi Birokrasi Badan Pengembangan Sumber Daya manusia Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2023 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU mempunyai tugas-tugas sebagai berikut :

1. Mengkoordinasikan Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, meliputi : Perencanaan Strategis, Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pengelolaan Data Kinerja dan Pelaporan Kinerja di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sulawesi Selatan;
2. Mengumpulkan dan Menganalisa Data Sebagai Bahan Penyusunan Dokumen Perencanaan Strategis, Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, dan Pelaporan Kinerja;
3. Melaksanakan Pengukuran Kinerja Sesuai Indikator Kinerja Yang Telah Ditetapkan Dalam Lembar/Dokumen Perjanjian Kinerja setiap akhir tahun selambat-lambatnya bulan Januari pada tahun berikutnya atau sesuai ketentuan yang berlaku;
4. Menyusun dokumen Perencanaan Strategis, Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi Kinerja, Pengukuran Kinerja dan Pelaporan Kinerja sesuai ketentuan yang berlaku;
5. Melakukan Verifikasi Dokumen Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja Dan Pelaporan Kinerja;
6. Melakukan evaluasi internal penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Reformasi Birokrasi di lingkup Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Selatan;

7. Melaporkan Hasil Pelaksanaan Tugas kepada Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Selatan.

KETIGA : Biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2023.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 06 Januari 2023

KEPALA BADAN



Prof. Dr. Muhammad Iufri, M.Si, M.Psi, Psikolog

Pangkat : Pembina Utama Madya

NIP. 19680202 199403 1 003

Tembusan, disampaikan Kepada Yth. :

1. Tim yang bersangkutan

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BPSDM PROVINSI SULAWESI SELATAN
NOMOR : 18 / I / 2023
TANGGAL : 06 JANUARI 2023
TENTANG : TIM EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
DAN REFORMASI BIROKRASI BADAN PENGEMBANGAN SUMBER
DAYA MANUSIA PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN ANGGARAN
2023

DAFTAR NAMA-NAMA TIM EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
DAN REFORMASI BIROKRASI BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN ANGGARAN 2023

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	Kepala BPSDM Prov.SulSel	Pengarah	Bertanggung jawab terhadap kegiatan evaluasi kinerja Berjalan dengan baik
2.	Sekretaris BPSDM Prov.SulSel	Penanggung Jawab	Bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan evaluasi kinerja di BPSDM
3.	Kepala Sub Bagian Program	Ketua	Bertanggung jawab terhadap seluruh pelaksanaan tugas Tim
4.	Kepala Bidang Kompetensi Manajerial	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
5.	Kepala Bidang Kompetensi Fungsional	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
6.	Kepala Bidang Kompetensi Teknis	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
7.	Kepala Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Kelembagaan	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
8.	Andi Zubaery Makkarodda, SE	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
9.	Amrullah Zainal ,S.Pd	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
10.	Achmad Syaiful Bachri, A.Md	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

KEPALA BADAN



Prof. Dr. Muhammad Jufri, M.Si, M.Psi, Psikolog
Pangkat : Pembina Utama Madya
NIP. 19680202 199403 1 003

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdaya guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik. Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi OPD sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Kota, Provinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan system pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Povinsi Sulawesi Selatan diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Penyusunan LKIP Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Povinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 yang dimaksudkan sebagai

perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

1.2 STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang kemudian ditindak lanjuti dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 83 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan fungsi, serta Tata Kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Selatan, maka Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia berkedudukan sebagai : “Unsur pendukung tugas kepala daerah untuk melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik, dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah”. Maka Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Selatan mempunyai Tugas dan fungsi sebagai berikut :

Tugas Pokok : Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Selatan mempunyai tugas menyelenggarakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pendidikan dan Pelatihan berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

Fungsi : Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia meliputi Perencanaan dan Pelatihan, Pengembangan dan Inovasi Kediklatan, Pendidikan dan Pelatihan Teknis Fungsional serta Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Aparatur;

- 1) Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan meliputi bidang Perencanaan dan Pelatihan, Pengembangan dan Inovasi Kediklatan, Pendidikan dan Pelatihan Teknis Fungsional serta Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Aparatur;
- 2) Pembinaan dan penyelenggaraan tugas dibidang Pendidikan dan Pelatihan meliputi Perencanaan dan Pelatihan, Pengembangan dan Inovasi Kediklatan, Pendidikan dan Pelatihan Teknis Fungsional serta Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Aparatur;
- 3) Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi Badan Pengembangan SDM Provinsi Sulawesi Selatan terdiri atas:

- (1) Kepala Badan;
- (2) Sekretariat;
- (3) Bidang;
- (4) Sub Bagian;

(5) Sub Bidang;

(6) Jabatan Fungsional;

Berikut uraian lebih lanjut tentang kelengkapan dari masing-masing komponen struktur organisasi :

1. Sekretariat

Sekretariat, terdiri atas:

- a. Sub Bagian Program;
- b. Sub Bagian Umum,Kepegawaian dan Hukum
- c. Sub Bagian Keuangan.

2. Bidang

Bidang terdiri atas :

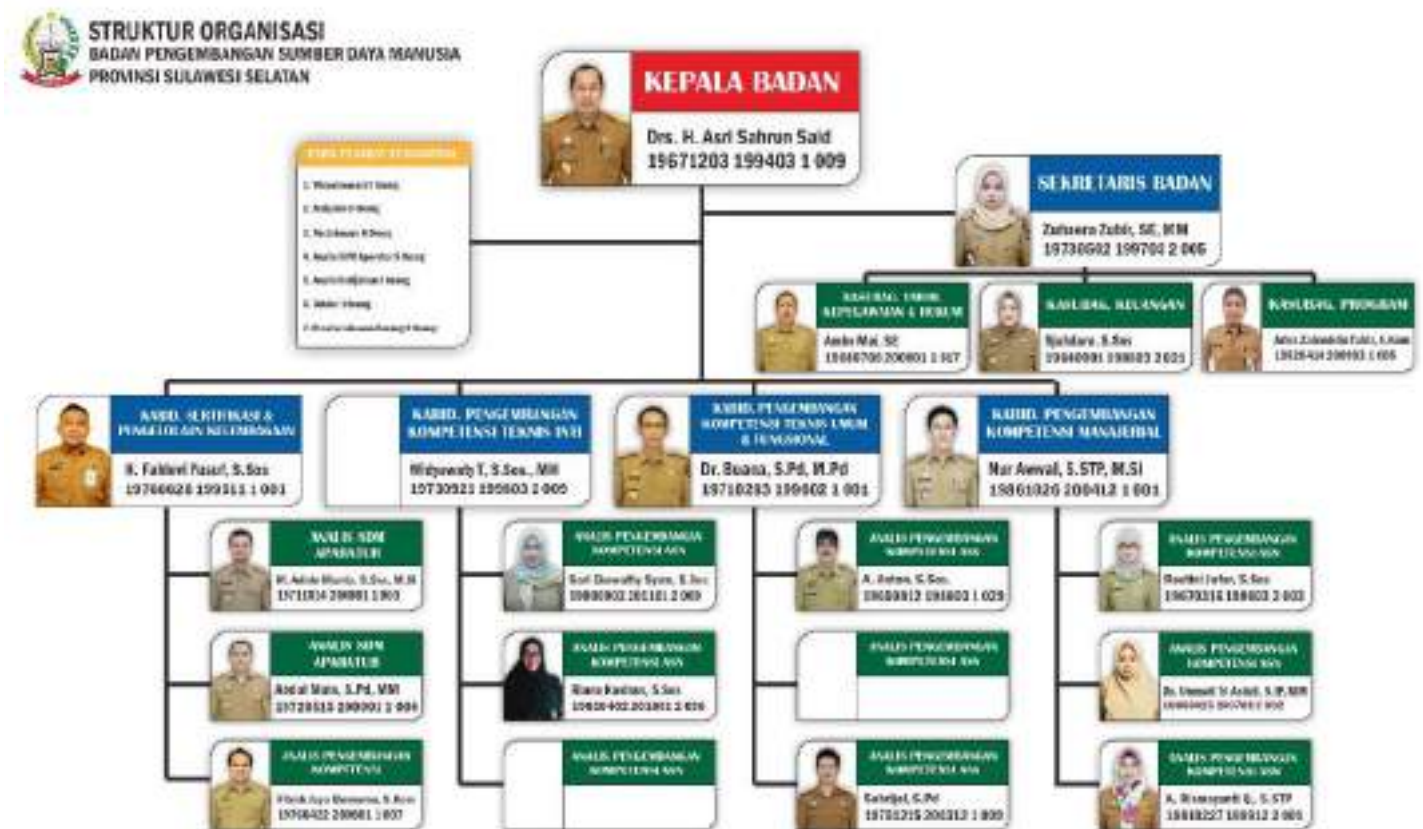
- a. Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Pengelolaan Kelembagaan;
- b. Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis Inti;
- c. Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis Umum & Fungsional;
- d. Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial

Setiap Bidang terdiri atas :

- 1. Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial, terdiri atas:
 - a. Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah;
 - b. Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi;
 - c. Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Kepemimpinan & Prajabatan;
- 2. Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis Umum & Fungsional, terdiri atas:
 - a. Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Umum Jabatan Administrasi;
 - b. Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Pilihan Jabatan Administrasi;
 - c. Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional
- 3. Bidang Sertifikasi Kompetensi & Pengelolaan Kelembagaan, terdiri atas:
 - a. Sub Bidang Sertifikasi Kompetensi;
 - b. Sub Bidang Pengelolaan Kelembagaan;
 - c. Sub Bidang Pengelolaan Sumber Belajar & Kerjasama;
- 4. Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis Inti, terdiri atas:
 - a. Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Inti Jabatan Administrasi Urusan konkuren wajib Pelayanan dasar & pilihan;
 - b. Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Inti Jabatan Administrasi Urusan Konkuren Wajib Non-Pelayanan Dasar; dan
 - c. Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Inti Jabatan Administrasi Perangkat Daerah Penunjang

5. Jabatan Fungsional, terdiri atas:

- a. Jabatan Fungsional adalah jabatan fungsional yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.;
- b. Pengangkatan Jabatan Fungsional pada Badan dilaksanakan berdasarkan hasil analisis kebutuhan dan formasi, serta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



1.3 SUMBER DAYA MANUSIA BPSDM

Guna menjamin pemenuhan tingkat kompetensi aparatur yang tersertifikasi baik dari sisi manajemen kediklatan maupun desain pembelajaran, maka Badan Pengembangan SDM Prov. Sulawesi Selatan telah memiliki pengakuan atau akreditasi dari Instansi Pembina Diklat (LAN – RI). Berdasarkan Surat Keputusan Kepala LAN-RI No. 713/K.1/PDP.09/2018 tanggal 19 November 2018 maka Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Prov. Sulawesi Selatan telah terakreditasi untuk melaksanakan Pelatihan Dasar CPNS, Pelatihan Kepemimpinan Administrasi dan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas selain itu berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 117 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Lembaga Serifikasi Penyelenggaraan (LSP) Urusan Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi Sulawesi Selatan, maka Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia telah memiliki Unit Lembaga Sertifikasi Penyelenggaraan Pemerintahan Dalam Negeri (LSP-PDN).

Sejak tahun 2009, BPSDM telah menerapkan sistem manajemen mutu (SMM) berdasarkan ISO 9001:2015 dengan demikian, Badan Pengembangan SDM Prov. Sul - Sel

sebagai institusi penyelenggara diklat Aparatur/PNS berhak memfasilitasi penyelenggara diklat terutama untuk Pemerintah Kab./Kota se Sulawesi Selatan yang institusi penyelenggara diklatnya belum terakreditasi. Dengan status ini hampir semua penyelenggaraan diklat di lingkup Pemerintah Kab./Kota se Sulawesi Selatan telah difasilitasi oleh Badan Pengembangan SDM Prov. Sul - Sel. Status lembaga terakreditasi ini juga bahkan telah berdampak pada semakin banyaknya jumlah pihak atau mitra kerjasama dalam penyelenggaraan kegiatan pengembangan kompetensi SDM terutama pendidikan dan pelatihan.

Sumber daya manusia adalah salah satu komponen penting dalam menjalankan kinerja organisasi secara menyeluruh. agar dapat terciptanya BPSDM Provinsi Sulawesi Selatan sebagai organisasi yang baik, maka kualitas dan kuantitas sumber daya manusianya perlu dirancang sesuai dengan kebutuhan.

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Badan Pengembangan SDM Provinsi Sulawesi Selatan didukung oleh sumber daya aparatur yang terdistribusi menurut bidang dan kesekretariatan. Berdasarkan data kepegawaian sampai dengan Juni 2022, jumlah ASN BPSDM Provinsi Sulawesi Selatan adalah sebanyak 138 (Seratus Tiga Puluh Delapan) orang.

Komposisi jabatan dalam struktur organisasi BPSDM Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan Peraturan Daerah tersebut di atas adalah : 1 (satu) orang Eselon II; 5 (lima) orang Eselon III yang terdiri dari 1 (satu) orang Sekretaris dan 4 (empat) orang Kepala Bidang; serta 15 orang Eselon IV yang terdiri 3 (tiga) orang kasubbag dan 12 orang kasubid. Selain itu BPSDM juga didukung oleh 81 (delapan puluh satu) tenaga fungsional yang terdiri dari 55 (Lima puluh lima) orang fungsional Widyaaiswara, Fungsional Arsiparis sebanyak 8 (Delapan) Orang, 6 (enam) orang fungsional pustakawan, 3 (tiga) orang fungsional Analis Kebijakan, fungsional Analis SDM Aparatur 5 (Lima) orang, 2 (dua) orang Fungsional Penata Laksana Barang Penyedia dan 1 (satu) orang Fungsional dokter.

Tabel 1.1.
Jumlah Pejabat Struktural Badan Pengembangan SDM
Provinsi Sulawesi Selatan
Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2022

No.	Keterangan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	Eselon II	1	-	1
2	Eselon III	3	2	5
3	Eselon IV	9	4	13
	Total	13	6	19

Sumber data : Bagian Umum & Kepeg. BPSDM Prov.Sulsel TA. 2022

Tabel 1.2.
Jumlah Pejabat Struktural
Badan Pengembangan SDM Provinsi Sulawesi Selatan
Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2022

No	Keterangan	Eselon			Jumlah
		II	III	IV	
1	Golongan IV	1	5	2	8
2	Golongan III	-	-	11	11
3	Golongan II	-	-	-	-
4	Golongan I	-	-	-	-
	Total	1	5	13	19

Sumber data : Bagian Umum & Kepeg. BPSDM Prov.Sulsel TA.2022

Tabel 1.3
Jumlah Pegawai Fungsional Badan Pengembangan SDM Provinsi Sulawesi Selatan
berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2022

No.	Keterangan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	Fungsional Widyaiswara Ahli Utama	10	5	15
2	Fungsional Widyaiswara Ahli Madya	27	6	33
3	Fungsional Widyaiswara Muda	3	5	7
4	Fungsional Arsiparis Ahli Madya	1	1	2
5	Fungsional Arsiparis Ahli Muda	3	2	5
6	Fungsional Arsiparis Ahli Pertama	1	-	1
7	Fungsional Pustakawan Ahli Madya	1	3	4
8	Fungsional Pustakawan Ahli Muda	1	1	2
9	Fungsional Analis Kebijakan Ahli Madya	1	-	1
10	Fungsional Analis Kebijakan Ahli Muda	-	2	2
11	Fungsional Analis SDM Aparatur Ahli Muda	-	3	3
12	Fungsional Analis SDM Aparatur Ahli Pertama	-	2	2
13	Fungsional Penata Laksana Barang Penyedia	2	-	2
14	Fungsional Dokter	1	-	1
	Total	51	30	81

Sumber data: Bagian Umum & Kepeg. BPSDM Prov. Sulsel TA.2022

Tabel 1.4
Gambaran Umum Pegawai berdasarkan Golongan dan Jenis Kelamin pada
Badan Pengembangan SDM Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022

Golongan Pegawai		Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki Laki	Perempuan	
Golongan IV	IV/e	-	5	5
	IV/d	11	-	11
	IV/c	10	1	11
	IV/b	14	6	20

Golongan Pegawai		Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki Laki	Perempuan	
	IV/a	11	8	19
Sub Total		46	20	66
Golongan III	III/d	15	15	30
	III/c	8	9	17
	III/b	3	4	7
	III/a	6	3	9
Sub Total		32	31	63
Golongan II	II/d	3	1	4
	II/c	-	1	1
	II/b	1	2	3
	II/a	1	-	1
Sub Total		5	4	9
Golongan I	I/d	-	-	-
	I/c	-	-	-
	I/b	-	-	-
	I/a	-	-	-
Sub Total		-	-	-
TOTAL		83	55	138

Sumber data : Bagian Umum & Kepeg. BPSDM Prov.Sulsel TA. 2022

Tabel 1.5
Gambaran Umum Pegawai berdasarkan Pendidikan formal yang ditamatkan pada Badan Pengembangan SDM Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022

No	Kualifikasi Pendidikan	Golongan II								Jmlh		Golongan III								Jmlh		Golongan IV										Jmlh		Jmlh Total	
		A		B		C		D				A		B		C		D				A		B		C		D		E					
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P				
1	SD									0	0									0	0											0	0	0	0
2	SMP									0	0									0	0											0	0	0	0
3	SMA	1		1	2			1	2	4	3									0	0											0	0	4	3
4	SARJANA MUDA / D III								1	0	1	1			1	3				4	1											0	0	4	2
5	SARJANA 1 (S1)							1		1	0	5	3	2	1	2	7	9	10	18	21	1	1		1			1				2	2	21	23
6	SARJANA 2 (S2)									0	0			1	2	3	2	4	2	8	6	8	5	6	4	6	1	8				28	10	36	16
7	SARJANA 3 (S3)									0	0						2	3	2	3	2	2	8	1	4		2			5	16	8	18	11	
	JUMLAH									0	0									0	0										0	0	83	55	
	TOTAL PEGAWAI BPSDM																												138						

Sumber data : Bagian Umum & Kepeg. BPSDM Prov.Sulsel TA. 2022

Pelaksanaan pelatihan dibiayai dengan dana yang berasal dari APBD Provinsi Sulawesi Selatan maupun dari Dana Retribusi Layanan Pendidikan untuk penyelenggaraan pelatihan, sertifikasi kompetensi, analisis kebutuhan diklat dan evaluasi dampak diklat. Layanan Pelatihan yang diselenggarakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Selatan terdiri atas :

- 1. Pelatihan Kepemimpinan, yaitu:**
- Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II
 - Pelatihan Kepemimpinan Administrator

- Pelatihan Kepemimpinan Pengawas
- 2. Pelatihan Dasar dan Diklat Pra Jabatan, yaitu:**
 - Pelatihan Dasar (Latsar) untuk CPNS
 - Diklat Prajabatan Gol. I dan II K1 / K2
 - Diklat Prajabatan Gol. III K1/K2
- 3. Pelatihan Teknis**
- 4. Pelatihan Fungsional dan Sosial Kultural**
- 5. Sertifikasi JFT (Jabatan Fungsional Tertentu)**

1.4 ISU STRATEGIS

Isu-isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam pelaksanaan sebuah program dan kegiatan karena dampaknya yang signifikan serta untuk menentukan tujuan penyelenggaraan di masa yang akan datang. Adapun isu strategis sebagaimana tertuang dalam dokumen Rencana Strategis Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 yaitu :

1. Memaksimalkan penerapan ISO 9001:2015 dalam rangka memenuhi tuntutan akan pelayanan penyelenggaraan pelatihan yang berkualitas dan berstandar;
2. Optimalisasi Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri (LSP PDN) dalam rangka pelaksanaan penilaian dan sertifikasi kompetensi aparatur;
3. Meningkatkan pemahaman terhadap kebijakan baru dalam melaksanakan pelatihan guna mendukung akreditasi pelatihan yang berkelanjutan;
4. Tingkatkan kualitas SDM aparatur dan Widyaiswara dalam menyongsong penerapan Sulawesi Selatan Corporate University;
5. Tingkatkan kualitas sarana dan prasarana penunjang pengembangan kompetensi guna mendukung pengembangan kompetensi yang modern dan berdaya saing sesuai dengan kebutuhan dalam era Revolusi Industri 4.0;
6. Peningkatan kualitas pelaksanaan program pengembangan kompetensi yang dinamis dan transparan mulai dari perencanaan hingga evaluasi dalam rangka meningkatkan daya saing;
7. Peningkatan kualitas perencanaan pengembangan kompetensi dalam rangka mengakomodir kebutuhan stakeholder dan menangkap isu yang berkembang dimasyarakat;
8. Pengembangan pelaksanaan program pengembangan kompetensi dalam bentuk kontribusi dan pola kemitraan / fasilitasi sehingga dapat meningkatkan kemandirian pembiayaan serta mengurangi ketergantungan terhadap pembiayaan dari APBD.

1.5 CASCADING KINERJA

Cascading merupakan proses penjabaran sasaran strategis, indikator kinerja utama (IKU) dan target organisasi secara vertikal dan horisontal yang bertujuan untuk menciptakan keselarasan dalam organisasi. Melalui cascading kinerja maka dapat diketahui keterhubungan antara indikator kinerja dengan sasaran strategis dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dalam RPJMD Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 disebutkan Visi Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan terpilih periode Tahun 2018-2023 adalah : **“Sulawesi Selatan Yang Inovatif, Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkarakter”**.

Dalam rumusan visi ini ada 5 (Lima) pokok visi yakni Inovatif diindikasikan oleh Kondisi Pemerintahan yang memiliki kemampuan men-ciptakan gagasan baru, produk baru dan layanan baru dalam kerangka pemerintahan yang baik sehingga terwujud Sulawesi Selatan yang “bersih dan melayani”, Produktif ditandai oleh kondisi perekonomian yang berkemampuanmenghasilkan produk barang dan jasa yang berdaya saing sehingga terwujud Sulawesi Selatan yang “mandiri dan sejahtera”, Kompetitif ditandai oleh kondisi Masyarakat yang memiliki sumber daya manusia (SDM) dengan kualitas tinggi sehingga terwujud Sulawesi Selatan yang “sehat dan cerdas, Inklusif ditandai oleh kondisi penyelenggaraan pembangunan yang melibatkan partisipasi seluruh unsur masyarakat dan seluruh bagian wilayah serta ramah terhadap lingkungan hidup sehingga terwujud Sulawesi Selatan yang “inlkusif dan terkoneksi”,serta Berkarakter ditandai oleh kondisi penyelenggaraan pembangunan yang dilandasi oleh spirit dan nilai-nilai luhur kebudayaan masyarakat sehingga terwujud Sulawesi Selatan yang “berkarakter” .

Visi dimaksud dijabarkan ke dalam beberapa misi utama sebagai berikut :

1. Mewujudkan Pemerintahan yang berorientasi melayani dan inovatif
2. Mewujudkan infrastruktur yang berkualitas dan aksesibel
3. Mewujudkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru yang produktif
4. Mewujudkan kualitas manusia yang kompetitif, inklusif dan berkarakter
5. Meningkatkan produktivitas dan daya saing produk Sumber Daya Alam yang berkelanjutan

Misi tersebut diatas kemudian diimplementasikan dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) BPSDM Provinsi Sulawesi Selatan melalui penetapan Sasaran yaitu :

Sasaran :

Meningkatnya Penataan dan Kualitas SDM Aparatur

Indikator : Indeks profesionalitas ASN

Target : 85,20

Pencapaian Sasaran diatas diukur melalui penetapan Tujuan yang kemudian menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Kepala BPSDM Provinsi Sulawesi Selatan sebagai berikut :

1. Tujuan : Meningkatkan Akuntabilitas Perangkat Daerah

Indikator : Nilai SAKIP

Target : 81,59

Program Pelaksana : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

2. Tujuan : Meningkatnya Kualitas Kompetensi PNS Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan

Indikator :

- a. Persentase peserta pelatihan kepemimpinan dan pelatihan dasar (latsar) yang memperoleh skor evaluasi minimal 70 : Target : 81,2
- b. Persentase peserta pelatihan urusan pemerintahan daerah SDM aparatur yang memperoleh skor evaluasi minimal 70 : Target : 81,2
- c. Persentase peserta pelatihan urusan jabatan fungsional social kultural yang memperoleh skor evaluasi minimal 70 : Target : 81,2
- d. Presentase peserta yang lulus uji sertifikasi kompetensi : Target : 81,2

Program Pelaksana : Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Adapun cascading kinerja disajikan dalam Gambar 1.2 sebagai berikut :

KETERKAITAN RPJMD PROVINSI SULAWESI SELATAN 2018 – 2023 DENGAN RENSTRA BPSDM TAHUN 2018 – 2023	
RPJMD TAHUN 2018 – 2023	RENSTRA TAHUN 2018 - 2023
VISI : Sulawesi Selatan Yang Inovatif, Produktif, Kompetitif, Inklusif, Dan Berkarakter	Tujuan 1 : Meningkatkan Kualitas Pengembangan Kompetensi Indikator : 1. Persentase peserta pelatihan kepemimpinan dan pelatihan dasar (latsar) yang memperoleh skor evaluasi minimal 70 2. Persentase peserta pelatihan urusan pemerintahan daerah SDM aparatur yang memperoleh skor evaluasi minimal 70 3. Persentase peserta pelatihan urusan jabatan fungsional social kultural yang memperoleh skor evaluasi minimal 70 4. Persentase peserta yang lulus uji sertifikasi kompetensi Program : Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas Kompetensi ASN dan Kapabilitas Kelembagaan Diklat
MISI 1 : Mewujudkan Pemerintahan yang Berorientasi Melayani dan Inovatif	Tujuan 2 : Meningkatkan Akuntabilitas Perangkat Daerah Indikator : Indeks Akuntabilitas Perangkat Daerah Program : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Sasaran 2 : Meningkatnya Akutanbilitas Kinerja, Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah
TUJUAN 1 : Meningkatkan Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintah yang Baik	
SASARAN 1 : Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	

1.6 RINGKASAN LAPORAN HASIL EVALUASI

Berdasarkan laporan hasil evaluasi atas implementasi SAKIP yang disampaikan melalui Surat dari Inspektorat Nomor 700.04/A.1/Itprov tanggal 29 Juli 2022, bahwa Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Selatan memperoleh **Nilai 81,25 atau Predikat A (Memuaskan)** dengan rincian sebagai berikut :

No	Komponen yang dinilai	Bobot	Hasil Evaluasi Tahun 2021
1.	Perencanaan Kinerja	30	23,10
2.	Pengukuran Kinerja	30	24,60
3.	Pelaporan Kinerja	15	12,30
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	21,25
Jumlah		100	81,25
Tingkat Akuntabilitas Kinerja			A (Memuaskan)

Penilaian tersebut diatas menunjukkan tingkat efektivitas dan efesiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerjanya memadai serta kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Selatan menunjukkan hasil yang sangat memuaskan.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah mendefinisikan Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja ini maka terjadi kesepakatan komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Adapun tujuan penyusunan perjanjian kinerja adalah sebagai berikut :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

2.1 RENSTRA 2018-2023

Rencana strategis satuan kerja perangkat daerah adalah proses sistematis pembuatan keputusan yang beresiko, dengan memanfaatkan pengetahuan aspiratif, mengorganisasi secara sistematis usaha-usaha melaksanakan keputusan tersebut dan mengukur hasilnya melalui umpan balik yang terorganisasi dan sistematis.

Rencana strategis satuan kerja perangkat daerah sebagai pedoman bagi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam menyusun sasaran, program dan kegiatan dalam mendukung pembangunan daerah. penyusunan Rencana strategis satuan kerja

perangkat daerah mempunyai tujuan untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintah dan Pembangunan.

Tabel 2.1
Sasaran dan Target Indikator Kinerja Utama 2019-2023 BPSDM Prov.Sul-Sel

Sasaran strategis	Indikator Kinerja utama	satuan	Target Kinerja Tahun ke				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4				
1. Meningkatnya Kualitas Kompetensi ASN dan Kapabilitas Kelembagaan Diklat	Persentase Kualitas Kompetensi ASN dengan Kategori Minimal Baik	Klasifikasi	B	BB	BB	A	AA
	Nilai Akreditasi Kelembagaan	Klasifikasi	B	BB	BB	A	AA
2. Meningkatnya Akutanbilitas Kinerja, Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Organisasi Perangkat Daerah	Kategori	B	BB	BB	A	AA
	Persentase ASN Nilai SKP Kategori Baik	Persentase	90	93	95	98	100
	Persentase Temuan Material	Persentase	0,15	0,15	0,12	0,10	0,05

2.2 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Penyusunan perjanjian kinerja dilakukan dengan menganut dokumen anggaran pada tahun bersangkutan dengan memperhatikan penetapan target pada dokumen Renstra maupun Renja pada tahun bersangkutan. Pada Tahun Anggaran 2022, di Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan terjadi refocusing anggaran yang dilakukan dalam rangka menunjang kegiatan percepatan pembangunan Infrastruktur Jalan sehingga terjadi perubahan anggaran yang dikelola oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Selatan dengan demikian Perjanjian Kinerja Kepala BPSDM Tahun 2022 ditetapkan sebagai berikut :

Tabel 2.2
Sasaran dan Target Indikator Kinerja Utama 2022 BPSDM Prov.Sul-Sel

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya Kualitas Kompetensi ASN dan Kapabilitas Kelembagaan Diklat	Persentase Kualitas Kompetensi ASN dengan Kategori Minimal Baik (skor 70-80)	85% (Klasifikasi A)
		Nilai Akreditasi Kelembagaan	82 (Klasifikasi A)

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
1	2	3	4
2	Meningkatnya Akutabilitas Kinerja, Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Organisasi Perangkat Daerah	85 (Kategori A)
		Persentase ASN Nilai SKP Kategori Baik	98%
		Persentase Temuan Material	0,10%

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp. 28.376.657.333,- dan Program Pengembangan Sumber Daya Manusia mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp. 2.514.392.550,- sehingga total pagu anggaran sebesar **Rp. 30.891.049.883,-** yang ditetapkan sebagai berikut :

Tabel 2.3
Perbandingan Struktur Anggaran Pokok dan Perubahan Tahun 2022
BPSDM Prov.Sul-Sel

NAMA ORGANISASI / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	SATUAN	ANGGARAN POKOK (Rp)	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH / BERKURANG
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA				30.617.569.648,00	30.891.049.883,00	273.480.235,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Penurunan Temuan berdasarkan LHP	0,1	Persen	27.606.968.648,00	28.376.657.333,00	769.688.685,00
	Persentase Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah	98	Persen			
	Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Baik dan Sangat Baik	100	Persen			
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	Persen	679.241.300,00	764.334.100,00	85.092.800,00
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	Persen	20.862.192.601,00	20.630.475.232,00	-231.717.369,00
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	Persen	336.912.900,00	558.181.900,00	221.269.000,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	Persen	884.981.640,00	1.244.240.240,00	359.258.600,00
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	Persen	112.817.723,00	847.364.723,00	734.547.000,00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	Persen	3.816.845.430,00	3.563.010.738,00	-253.834.692,00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	Persen	913.977.054,00	769.050.400,0	-144.926.654,00
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Cakupan SDM Aparatur yang Lulus Diklat Kompetensi Manajerial, Kompetensi Diklat Fungsional, Kompetensi Diklat Sosial Kultural	100	Persen	3.010.601.000,00	2.514.392.550,00	-496.208.450,00
Pengembangan Kompetensi Teknis	Persentase Pengembangan Kompetensi Teknis	100	Persen	1.629.773.050,00	1.372.847.150,00	-256.925.900,00
Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Persentase Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	100	Persen	1.380.827.950,00	1.141.545.400,00	-239.282.550,00

Dengan adanya Perjanjian Kinerja diatas maka ditindaklanjuti dengan penetapan Perjanjian Kinerja pada setiap unit dilingkungan BPSDM Provinsi Sulawesi Selatan dengan perbandingan matriks kinerja sebagai berikut :

1. Sekretariat

Adapun perbandingan perjanjian kinerja Sekretariat pada awal tahun anggaran 2022 (APBD) dan akhir tahun anggaran 2022 (P-PABD) sebagaimana tabel berikut :

Perbandingan Perjanjian Kinerja
BPSDM Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022
SEKRETARIAT

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Target Perubahan
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja BPSDM	Persentase Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah	100%	100%
		Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Baik	100%	100%
		Persentase Penurunan Temuan Berdasarkan LHP	0,10%	0,10%
No.	Program/Kegiatan		Anggaran Pokok	Anggaran Perubahan
1	2		3	4
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi		Rp 27.606.968.648,00	Rp 28.376.657.333,00
-	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Rp 679.241.300,00	Rp 764.334.100,00
-	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Rp 20.862.192.601,00	Rp 20.630.475.232,00
-	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Rp 336.912.900,00	Rp 558.181.900,00
-	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Rp 884.981.640,00	Rp 1.244.240.240,00
-	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Rp 112.817.723,00	Rp 847.364.723,00
-	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Rp 3.816.845.430,00	Rp 3.563.010.738,00
-	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Rp 913.977.054,00	Rp 769.050.400,00

2. Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial

Adapun perbandingan perjanjian kinerja Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial pada awal tahun anggaran 2022 (APBD) dan akhir tahun anggaran 2022 (P-PABD) sebagaimana tabel berikut :

Perbandingan Perjanjian Kinerja
BPSPDM Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022
Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Target Perubahan
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Kualitas Kompetensi ASN dengan Kategori Minimal Baik (skor 70-80)	Persentase Kualitas Kompetensi Manajerial ASN dengan Kualifikasi Kelulusan Minimal Baik (skor 70-80)	100%	100%
No.	Program/Kegiatan		Anggaran	Anggaran Perubahan
1	2		3	4
1.	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia		Rp 740.797.300,00	Rp 724.697.200,00
-	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional		Rp 740.797.300,00	Rp 724.697.200,00

Secara umum tidak ada perubahan dalam penetapan target kinerja pada Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial dikarenakan penghitungan target dilakukan pada alumni pelatihan yang diselenggarakan. Adanya perubahan anggaran yang dikelola dimanifestasikan dalam bentuk pengurangan kegiatan yang dilakukan yang berpengaruh pada perubahan target alumni pelatihan.

Pelaksanaan pengurangan anggaran dan atau kegiatan dilakukan dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Untuk kegiatan yang sudah dilaksanakan, pengurangan anggaran dilakukan pada pos belanja yang memiliki kemungkinan penyerapannya rendah. contoh : Belanja Perjalanan Dinas, Belanja Makanan dan Minuman Rapat.
- Untuk kegiatan yang belum dilaksanakan yang berasal dari pembiayaan APBD Murni Provinsi Sulawesi Selatan pada umumnya langsung dilakukan pemotongan/dihapus guna memenuhi target pemotongan anggaran yang telah ditetapkan oleh instansi yang berwenang (BKAD Provinsi Sulawesi Selatan).

3. Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis Umum dan Fungsional

Adapun perbandingan perjanjian kinerja Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis Umum dan Fungsional pada awal tahun anggaran 2022 (APBD) dan akhir tahun anggaran 2022 (P-PABD) sebagaimana tabel berikut :

Perbandingan Perjanjian Kinerja
BPSPDM Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022

Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis Umum dan Fungsional

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Target Perubahan
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Kualitas Kompetensi ASN dengan Kategori Minimal Baik (skor 70-80)	Persentase Kualitas Kompetensi Teknis ASN dengan Kualifikasi Kelulusan Minimal Baik (skor 70-80)	100%	100%
		Persentase Kualitas Kompetensi Fungsional ASN dengan Kualifikasi Kelulusan Minimal Baik (skor 70-80)	100%	100%
No.	Program/Kegiatan		Anggaran	Anggaran Perubahan
1	2		3	4
1.	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia		Rp 949.097.100,00	Rp 913.997.101,00
-	Pengembangan Kompetensi Teknis		Rp 588.786.850,00	Rp 553.686.851,00
-	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional		Rp 360.310.250,00	Rp 360.310.250,00

Secara umum tidak ada perubahan dalam penetapan target kinerja pada Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis Umum dan Fungsional dikarenakan penghitungan target dilakukan pada alumni pelatihan yang diselenggarakan. Adanya perubahan anggaran yang dikelola dimanifestasikan dalam bentuk pengurangan kegiatan yang dilakukan yang berpengaruh pada perubahan target alumni pelatihan.

Pelaksanaan pengurangan anggaran dan atau kegiatan dilakukan dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Untuk kegiatan yang sudah dilaksanakan, pengurangan anggaran dilakukan pada pos belanja yang memiliki kemungkinan penyerapannya rendah. contoh : Belanja Perjalanan Dinas, Belanja Makanan dan Minuman Rapat.
- Untuk kegiatan yang belum dilaksanakan yang berasal dari pembiayaan APBD Murni Provinsi Sulawesi Selatan pada umumnya langsung dilakukan pemotongan/dihapus guna memenuhi target pemotongan anggaran yang telah ditetapkan oleh instansi yang berwenang (BKAD Provinsi Sulawesi Selatan).

4. Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis Inti

Adapun perbandingan perjanjian kinerja Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis Inti pada awal tahun anggaran 2022 (APBD) dan akhir tahun anggaran 2022 (P-PABD) sebagaimana tabel berikut :

**Perbandingan Perjanjian Kinerja
BPSDM Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022
Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis Inti**

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Target Perubahan
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Kualitas Kompetensi ASN dengan Kategori Minimal Baik (skor 70-80)	Persentase Kualitas Kompetensi Teknis Inti ASN dengan Kualifikasi Kelulusan Minimal Baik (skor 70-80)	100%	100%
No.	Program/Kegiatan		Anggaran	Anggaran Perubahan
1	2		3	4
1.	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia		Rp 690.502.200,00	Rp 630.453.700,00
-	Pengembangan Kompetensi Teknis		Rp 690.502.200,00	Rp 630.453.700,00

Secara umum tidak ada perubahan dalam penetapan target kinerja pada Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis Inti dan Fungsional dikarenakan penghitungan target dilakukan pada alumni pelatihan yang diselenggarakan. Adanya perubahan anggaran yang dikelola dimanifestasikan dalam bentuk pengurangan kegiatan yang dilakukan yang berpengaruh pada perubahan target alumni pelatihan.

Pelaksanaan pengurangan anggaran dan atau kegiatan dilakukan dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Untuk kegiatan yang sudah dilaksanakan, pengurangan anggaran dilakukan pada pos belanja yang memiliki kemungkinan penyerapannya rendah. contoh : Belanja Perjalanan Dinas, Belanja Makanan dan Minuman Rapat.
- Untuk kegiatan yang belum dilaksanakan yang berasal dari pembiayaan APBD Murni Provinsi Sulawesi Selatan pada umumnya langsung dilakukan pemotongan/dihapus guna memenuhi target pemotongan anggaran yang telah ditetapkan oleh instansi yang berwenang (BKAD Provinsi Sulawesi Selatan).

5. Bidang Sertifikasi Pengelolaan Kelembagaan

Adapun perbandingan perjanjian kinerja Bidang Sertifikasi Pengelolaan Kelembagaan pada awal tahun anggaran 2022 (APBD) dan akhir tahun anggaran 2022 (P-PABD) sebagaimana tabel berikut :

Perbandingan Perjanjian Kinerja
 BPSDM Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022
 Bidang Sertifikasi Pengelolaan Kelembagaan

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Target Perubahan
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Kelembagaan dan Sertifikasi Kompetensi	Status Akreditasi Kelembagaan (Skor 80,1-90)	82 Nilai (Akreditasi A)	82 Nilai (Akreditasi A)
		Status Sertifikasi Kompetensi ASN (Skor 80,1-90)	82 Nilai (Akreditasi A)	82 Nilai (Akreditasi A)
No	Program/Kegiatan		Anggaran	Anggaran Perubahan
1	2		3	4
1.	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia		630.134.400,00	575.835.501,00
-	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional		630.134.400,00	575.835.501,00

Secara umum tidak ada perubahan dalam penetapan target kinerja pada Bidang Sertifikasi Pengelolaan Kelembagaan. Adanya perubahan anggaran yang dikelola dimanifestasikan dalam bentuk pengurangan kegiatan yang dilakukan yang berpengaruh pada pengurangan jumlah dokumen manajemen pengajaran dan peserta sertifikasi kompetensi.

Pelaksanaan pengurangan anggaran dan atau kegiatan dilakukan dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Untuk kegiatan yang sudah dilaksanakan, pengurangan anggaran dilakukan pada pos belanja yang memiliki kemungkinan penyerapannya rendah. contoh : Belanja Perjalanan Dinas, Belanja Makanan dan Minuman Rapat.
- Untuk kegiatan yang belum dilaksanakan yang berasal dari pembiayaan APBD Murni Provinsi Sulawesi Selatan pada umumnya langsung dilakukan pemotongan/dihapus guna memenuhi target pemotongan anggaran yang telah ditetapkan oleh instansi yang berwenang (BKAD Provinsi Sulawesi Selatan).

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 METODE PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2022

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan dan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tanggal 20 November 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Selatan berkewajiban untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja ini adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai atas hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Olehnya itu di bab ini, akan diuraikan capaian kinerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Prov. SulSel untuk tahun 2022, baik capaian sasaran organisasi maupun capaian keuangan dari anggaran yang berhasil diserap di tahun 2022 ini yang dikelola oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia selaku Perangkat Daerah (PD) Provinsi Sulawesi Selatan, sebagaimana yang dapat dijelaskan dibawah ini.

Pengukuran kinerja tahun 2022 meliputi pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran kinerja sasaran serta pelaporan realisasi keuangan. Pengukuran kinerja kegiatan menggunakan indikator kinerja masukan (*input*), keluaran (*output*), dan hasil (*outcome*), sedangkan pengukuran kinerja sasaran menggunakan indikator makro yang telah ditetapkan dalam Renstra Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Prov. SulSel Tahun 2018-2023. Namun demikian pengukuran indikator *outcome* kegiatan masih perlu ditingkatkan kualitasnya karena pengukuran indikator tersebut tidak dapat diimplementasikan hanya pada satu kegiatan saja, tetapi akan sangat erat kaitannya dengan kegiatan lainnya.

Metode yang digunakan untuk menghitung tingkat capaian kinerja kegiatan dan sasaran di atas adalah dengan menggunakan perbandingan sederhana antara target dan realisasi dalam tahun yang bersangkutan. Untuk menghitung tingkat capaian kinerja sasaran, bobot yang diberikan adalah sama besar yang berarti diasumsikannya bahwa setiap indikator sasaran dari suatu sasaran memiliki pengaruh yang sama terhadap sasaran yang bersangkutan.

Berdasarkan penghitungan tingkat capaian kinerja untuk masing-masing sasaran tersebut di atas, selanjutnya dihitung tingkat capaian kinerja secara keseluruhan dengan

menggunakan metode rata-rata sederhana. Dari hasil penghitungan tersebut ditetapkan tingkat capaian kinerja dengan menggunakan rentang penilaian sebagai berikut:

Tabel 3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	91 % ≤	Sangat Tinggi
2	76% s.d 90 %	Tinggi
3	66 % s.d 75 %	Sedang
4	51 % s.d 65 %	Rendah
5	50 %	Sangat Rendah

Sumber Data: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Untuk lebih jelasnya dibawah ini dijelaskan realisasi pencapaian target dari masing-masing indikator kinerja dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

1. Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus :

Persentase Pencapaian Target Dari Masing-masing Indikator Kinerja =

$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

2. Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja , maka digunakan rumus :

Persentase Pencapaian Target Dari Masing-masing Indikator Kinerja =

$$\frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\%$$

3.2 CAPAIAN IKU BPSDM TAHUN 2022

Untuk mengukur keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang akan digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja, maka dalam laporan kinerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 ini akan dijelaskan capaian kinerja

tujuan dan sasaran RPJMD. Perbandingan Pencapaian IKU BPSDM Provinsi Sulawesi Selatan terhadap BPSDM Nasional secara ringkas digambarkan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.2
Perbandingan Pengukuran Capaian Kinerja
Provinsi dan Nasional Tahun 2022

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target		Realisasi		Capaian	
			Provinsi	Nasional	Provinsi	Nasional	Provinsi	Nasional
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya Kualitas Kompetensi ASN dan Kapabilitas Kelembagaan Diklat	Persentase Kualitas Kompetensi ASN dengan Kategori Minimal Baik (skor 70-80)	85%	80%	84%	81%	98,8%	101,25%
		Nilai Akreditasi Kelembagaan	82 Nilai (Kategori A)	A	83 Nilai (Kategori A)	85	101,21%	106,25%

Dari gambaran diatas, dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia ProvinSi Sulawesi Selatan dapat mencapai sasaran yang ditargetkan pada tahun 2022. Selanjutnya di bawah ini, diuraikan lebih lanjut mengenai capaian masing-masing sasaran, serta program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia ProvinSi Sulawesi Selatan dapat mencapai sasaran yang ditargetkan pada tahun 2022 sebagai berikut :

3.3 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan organisasi dalam mencapai kinerjanya perlu dilakukan pengukuran kinerja karena merupakan proses penilaian yang sistematis berdasarkan indicator kinerja yang telah ditetapkan. Evaluasi dan analisis kinerja dilakukan terhadap hasil pengukuran kinerja untuk mengetahui hal- hal yang mempengaruhi keberhasilan dan atau kegagalan pencapaian suatu sasaran. Langkah ini bertujuan agar diketahui tingkat pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dihadapi. Pengukuran capaian kinerja dilakukan terhadap setiap kegiatan, melalui langkah-langkah yakni :

1. Membandingkan realisasi kinerja dengan kinerja yang direncanakan;
2. Menghitung capaian kinerja dengan cara angka realisasi dibagi dengan angka target/rencana kerja, kemudian dikalikan dengan 100%.
3. Mengumpulkan data hasil pelaksanaan seluruh kegiatan, terutama pelaksanaan kegiatan peningkatan kompetensi aparatur.
4. Membandingkan realisasi dengan target yang telah ditetapkan di dalam Perjanjian Kinerja.
5. Menghitung Persentase Capaian Kinerja.

6. Menghitung rata-rata capaian kinerja dari seluruh indikator sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Adapun kegiatan dan langkah-langkah yang telah dilakukan dalam menunjang Percepatan Pencapaian Target Akuntabilitas Kinerja yakni :

1. In House Training Implementasi SAKIP
2. Workshop Kualitas Implementasi SAKIP
3. Asistensi Perjanjian Kinerja (PK) Eselon III dan Eselon IV lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan oleh TIM Asistensi Provinsi Sulawesi Selatan
4. Tindak Lanjut Hasil Workshop Implementasi SAKIP
5. Pendampingan Implementasi SAKIP
6. Pemaparan Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP & RB di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai 2 Sasaran Strategis dalam pelaksanaan ketugasannya, ke-dua sasaran tersebut didukung oleh 5 Indikator Kinerja Utama seperti berikut :

Tabel 3.3
Pengukuran Capaian Kinerja
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Selatan
Tahun 2022

No.	Tujuan Strategis	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Kinerja		
				Target	Realisasi	Capaian
1		2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Kualitas Kompetensi PNS Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan	Meningkatnya Kualitas Kompetensi ASN dan Kapabilitas Kelembagaan Diklat	Persentase Kualitas Kompetensi ASN dengan Kategori Minimal Baik (skor 70-80)	85%	84%	98,8%
			Nilai Akreditasi Kelembagaan	82 Nilai (Kategori A)	83 Nilai (Kategori A)	101,21%
2	Meningkatkan Akuntabilitas Perangkat Daerah	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja, Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Organisasi Perangkat Daerah	85 Nilai (Kategori A)	81,25 Nilai (Kategori A)	95,5%
			Persentase ASN Nilai SKP Kategori Baik	98%	98 %	100%
			Persentase Temuan Material	0,10%	0,01%	100%

Sasaran strategis ke-1 yaitu Meningkatkan Kualitas Kompetensi ASN dan Kapabilitas Kelembagaan Diklat, dimana Indikator Kinerja Utamanya yaitu :

- **Kualitas Kompetensi ASN dengan Kategori Minimal Baik (skor 70-80)** yaitu evaluasi dari Pelatihan yang dilaksanakan Badan pengembangan Sumber Daya Manusia yaitu

Pelatihan Peningkatan Akuntabilitas dan Kinerja OPD berbasis Perencanaan, yang ditarget pada tahun 2022 yaitu Kualitas Kompetensi ASN dengan Kategori Minimal Baik sebesar 85 terealisasi sebesar 84% sehingga capaian sebesar 98,8% *atau kriteria* “Sangat Tinggi”, dimana pencapaian kinerjanya tercapai dengan keterpenuhinya Kualitas Kompetensi ASN dengan Kategori Baik.

- **Nilai Akreditasi Kelembagaan** yaitu evaluasi dari Penilaian Akreditasi yang dilaksanakan Badan pengembangan Sumber Daya Manusia yaitu Sarana Prasarana, Tenaga Pengajar, Materi Pembelajaran, dan Kualitas Jaringan Pelatihan yang ditargetkan sebesar Nilai 82 atau Kategori A terealisasi sebesar 83 sehingga capaian sebesar 101,21% *atau kriteria* “Sangat Tinggi”, dimana pencapaian kinerjanya tercapai dengan keterpenuhinya Akreditasi Kelembagaan.

Sasaran strategis ke-2 yaitu Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja, Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah, dimana Indikator Kinerja Utamanya yaitu :

- **Nilai SAKIP Organisasi Perangkat Daerah** Yaitu sistem yang integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan Pelatihan yang dilaksanakan pada tahun 2022 telah dilaksanakan berdasarkan kebutuhan standar dimana pada tahun ini ditargetkan sebesar Nilai 85 atau Kategori A dan terealisasi sebesar 81,25 *kriteria* “Sangat Tinggi”, dimana pencapaian kinerjanya tercapai dengan keterpenuhinya Nilai SAKIP Organisasi Perangkat Daerah dengan Kategori A.
- **Persentase ASN Nilai SKP Kategori Baik** yaitu dalam hal disiplin maupun kinerja dalam pelaksanaan tugas yang diberikan dapat dilakukan dengan baik, dimana di tahun ini hasil yang diperoleh yakni sebesar 100% atau tingkat capaian sebesar 100% *atau kriteria* “Sangat Tinggi” dari yang ditarget 98%. Untuk memperoleh nilai SKP Kategori Baik, yaitu melalui ASN yang bekerja dengan baik, dengan formulasi Perhitungan sebagai berikut:
 - a. Sasaran Kerja Pegawai yang terdiri dari : Kuantitas/Output, Kualitas/Mutu, Waktu dan Biaya.
 - b. Prilaku Kerja yang terdiri dari : Orientasi pelayanan, Integritas, komitmen, Disiplin, Kerjasama, dan Kepemimpinan
 - c. Dengan Penilaian : < 50 : Buruk ; <60 Kurang ; <75 Cukup ; <85 Baik ; 99 Sangat Baik
- **Persentase Temuan Material**, yaitu untuk tahun 2022 terealisasi atau diperoleh sebesar **0.01 %**“, dimana capaian kinerja yang diperoleh kriteria “ Sangat Tinggi” dari yang targetkan tahun 2022 sebesar **0.10 %**. Temuan material untuk tahun 2022 yang diperoleh BPSDM berdasarkan LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) dapat diuraikan dalam tabel berikut :

Tabel 3.4
Daftar Hasil Temuan LHP

No.	Nama	Jumlah
1.	Pembelian Bahan Bakar	Rp 1.528.000
2.	Perjalanan Dinas	Rp 1.058.000
3.	Pemungutan Pajak PPN	Rp 907.500
Jumlah		Rp 3.493.500

Realisasi 2022 =

Temuan LHP

Realisasi Keuangan TA 2022

X
100%

Realisasi 2022 =

Rp. 3.493.500

Rp.30.891.049.883

X
100%
=
0.011%

Adapun hasil capaian kinerja dari Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Selatan :

1) Penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan dan Pelatihan Dasar CPNS

Pelatihan Kepemimpinan PNS dan Pelatihan Dasar CPNS adalah pelatihan yang dilaksanakan dalam rangka mencapai persyaratan kompetensi aparatur pemerintah yang sesuai dengan jenjang jabatan struktural yang dibutuhkan. Adapun realisasi penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan dan Pelatihan Dasar CPNS adalah sebagai berikut :

Tabel 3.5
Realisasi Penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan dan Pelatihan Dasar CPNS

No.	Jenis Diklat	Target	Realisasi		Total
			L	P	
I.	Program Pelatihan Kepemimpinan PNS dan Pelatihan Dasar CPNS				
1.	Pelatihan Kepemimpinan Administrator	40	30	10	40
2.	Pelatihan Kepemimpinan Pengawas	80	57	23	80
3.	Pelatihan Dasar CPNS	1850	730	1.114	1.850

2) Pelatihan Kompetensi Teknis dan Fungsional

Pelatihan Kompetensi Teknis Fungsional dan Sosial Kultural dilaksanakan untuk mencapai persyaratan Kompetensi Teknis yang diperlukan untuk melaksanakan tugas PNS dan untuk mencapai persyaratan kompetensi yang sesuai dengan jenis dan jenjang Jabatan

Fungsional masing-masing serta dalam rangka meningkatkan Kompetensi Tenaga Kediklatan serta peningkatan kompetensi Sosial Kultural Adapun realisasi Pelatihan Kompetensi Teknis sebagai berikut :

Tabel 3.6
Realisasi Pelatihan Kompetensi Teknis

No.	Jenis Diklat	Target	Realisasi		Total
			L	P	
I.	Pelatihan Kompetensi Teknis dan Fungsional				
1.	Pelatihan Lanjutan untuk Penilai Barang Milik Daerah	30	19	10	29
2.	Penguatan Spiritual Kepala OPD	55	30	25	55
3.	Peningkatan Kapasitas Perbendaharaan	169	95	74	169
4.	Pelatihan Pengembangan Kompetensi Fasilitator Pelaku UKM, IKM, Usaha Ekonomi Kreatif & Fasilitator Pemasaran Hasil Usaha	80	45	35	80
5.	FGD Penyusunan Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan	30	20	10	30
6.	Orientasi Learning Advisor	30	15	15	30
7.	Penyamaan persepsi penyelenggaraan latsar CPNS	30	20	10	30
8.	Pelatihan Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja	40	25	15	40
9.	Pelatihan Peningkatan Kapasitas Camat/Lurah	30	15	15	30
10.	Penguatan Staf Ahli Provinsi dan Kab/Kota	20	10	10	20
11.	Pelatihan Pengembangan Aplikasi E-Learning dan Sarana Pembelajaran Digital	30	20	10	30
12.	Bimbingan Teknis Penyusunan Penjaminan Mutu	30	20	10	30
13.	Bimbingan Teknis	40	35	5	40

No.	Jenis Diklat	Target	Realisasi		Total
			L	P	
	Pejabat Fungsional Hasil Penyetaraan				
14.	Diklat Pelayanan Publik Bagi ASN	30	20	10	30
15.	Diklat Kinerja dan Kedisiplinan PNS	30	20	10	30
TOTAL		674	409	264	673

3.4 PERBANDINGAN ANTARA REALISASI KINERJA TAHUN 2022 DENGAN TAHUN SEBELUMNYA

Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2022 dengan tahun sebelumnya berdasarkan indikator kinerja, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.7
Perbandingan antara Realisasi Kinerja tahun 2022
dengan Tahun sebelumnya

No.	Tujuan Strategis	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Realisasi Kinerja	
				2021	2022
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Kualitas Kompetensi PNS Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan	Meningkatnya Kualitas Kompetensi ASN dan Kapabilitas Kelembagaan Diklat	Persentase Kualitas Kompetensi ASN dengan Kategori Minimal Baik (skor 70-80)	83%	84%
			Nilai Akreditasi Kelembagaan	82 (Kategori A)	83 (Kategori A)
2	Meningkatkan Akuntabilitas Perangkat Daerah	Meningkatnya Akutanbilitas Kinerja, Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Organisasi Perangkat Daerah	74,22 (Kategori BB)	81,25 (Kategori A)
			Persentase ASN Nilai SKP Kategori Baik	98 %	98 %
			Persentase Temuan Material	0,10%	0,01%

Jika dibandingkan dengan hasil tahun lalu, capaian kinerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan Kualitas Kompetensi ASN dengan Kategori Minimal Baik, Nilai Akreditasi Kelembagaan, Nilai SAKIP Organisasi Perangkat Daerah, Persentase ASN Nilai SKP Kategori Baik dan Persentase Temuan Material dapat dilihat bahwa ada peningkatan di tahun ini. Hal ini menunjukkan, terdapat perbaikan yang progresif yang dilakukan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Prov. SulSel dalam meningkatkan program Pelatihan dan pengembangan ASN sehingga dapat lebih Profesional dalam menjalankan tugas dan Fungsinya.

3.5 PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2022 DENGAN TARGET JANGKA MENENGAH YANG TERDAPAT DALAM DOKUMEN PERENCANAAN STRATEGIS

Adapun perbandingan realisasi kinerja tahun 2022 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis dan standar nasional untuk indikator sasaran ini, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.8
Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 5 Tahun 2022 dengan target Jangka Menengah yang terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis

No.	Tujuan Strategis	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Realisasi Kinerja 2022	Target Jangka Menengah	Capaian Kinerja Jangka Menengah
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Kualitas Kompetensi PNS Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan	Meningkatnya Kualitas Kompetensi ASN dan Kapabilitas Kelembagaan Diklat	Persentase Kualitas Kompetensi ASN dengan Kategori Minimal Baik (skor 70-80)	84%	85%	100%
			Nilai Akreditasi Kelembagaan	83 (Kategori A)	85 (Kategori A)	100%
2	Meningkatkan Akuntabilitas Perangkat Daerah	Meningkatnya Akutanbilitas Kinerja, Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Organisasi Perangkat Daerah	81,22 (Kategori A)	85 (Kategori A)	100%
			Persentase ASN Nilai SKP Kategori Baik	98 %	98 %	100%
			Persentase Temuan Material	0,01%	0,2%	100%

Di tahun 2022 ini, dimana menjadi tahun keempat dari pengukuran kinerja dari Renstra Periode 2018-2023, terlihat bahwa capaian yang dihasilkan telah sangat baik, dimana Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia memperlihatkan adanya upaya dalam meningkatkan kompetensi dan profesionalisme ASN melalui pelatihan-pelatihan. Hal ini tentu menjadi pendorong dalam mencapai target-target kinerja di tahun-tahun mendatang.

3.6 ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/ KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN/ PENURUNAN KINERJA SERTA ALTERNATIVE SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN.

Dari analisis capaian kinerja diatas, dapat dilihat bahwa Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Prov. SulSel dalam meningkatkan tingkat profesinalitas dan kompetensi ASN maka dilaksanakan pelatihan-pelatihan yang dibutuhkan ASN, yang telah memenuhi Kualitas Kompetensi ASN dengan Kategori Minimal Baik, Nilai Akreditasi Kelembagaan, Nilai SAKIP Organisasi Perangkat Daerah, Persentase ASN Nilai SKP Kategori Baik dan Persentase Temuan Material dan dengan berbagai upaya yang dilakukan antara lain perbaikan fasilitas dan sarana kerja, peningkatan kemampuan dan wawasan ASN dengan mengikutsertakan dalam kegiatan bimtek, sosialisasi dan lainnya. Selain itu secara rutin, diadakan pertemuan internal dalam membahas hasil pelaksanaan kegiatan dari masing-masing unit kerja, sehingga dapat diketahui kendala permasalahan yang dihadapi

dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Sejalan dengan itu, koordinasi dan konsultasi kepada pihak eksternal lainnya pun dilakukan untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan dalam rangka mewujudkan tata kelola perangkat daerah yang baik dan professional.

Secara umum, pelaksanaan program kegiatan pengembangan kompetensi aparatur pemerintah sampai dengan 31 Desember tahun 2022 dapat dilaksanakan sesuai dengan yang direncanakan. Berdasarkan capaian pada kedua sasaran strategis yaitu Meningkatnya Kualitas Kompetensi ASN dan Kapabilitas Kelembagaan Diklat dan Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja, Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah didapatkan capaian kinerja tahun 2022 rerata sebesar 99,10 %.

Untuk realisasi anggaran setelah Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun 2022 sebesar Rp. 29.569.380.007 dari pagu P-APBD 2022 sebesar Rp. 30.891.049.883,00 atau 95,72%. Dari hasil tersebut secara umum untuk penyerapan anggaran sangat optimal dengan analisis serapan sebagai berikut :

1. Analisis serapan Belanja Daerah dari target realisasi belanja sebesar 97,10% didapatkan realisasi belanja sebesar 95,72% atau capaian sebesar 98,57%. Hal ini disebabkan Perubahan pola diklat (klasikal ke daring) dan adanya refocusing anggaran yang menyebabkan sebagian alokasi anggaran belanja pelaksanaan pelatihan tidak terserap secara maksimal antara lain belanja makanan minuman kegiatan/pelatihan, perjalanan dinas, honorarium narasumber dan obat-obatan) Adapun solusi yang dilakukan yaitu :
 - a. Dengan mendesain kembali perencanaan penganggaran pelatihan sesuai dengan kondisi perkembangan pandemic.
 - b. Meningkatkan pemanfaatan teknologi agar lebih mampu menjawab tuntutan perubahan dan tetap mempertahankan serta meningkatkan daya saing yang telah dimiliki Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Selatan sebagai salah satu institusi / lembaga yang telah diakui keberadaannya secara nasional dalam pengembangan bidang kompetensi aparatur.
2. Analisis realisasi target PAD

Untuk realisasi target PAD sebesar 119,9 % yang mana hal ini sangat dipengaruhi kemampuan instansi pengirim yang pada umumnya terkena refocusing anggaran. Adapun solusi yang dilakukan yaitu dengan mengidentifikasi usulan kebutuhan pengembangan kompetensi ASN di Kab/Kota secara periodik serta melakukan koordinasi secara intensif dengan institusi terkait mengenai kebutuhan diklat sesuai substansi (kompetensi) yang dibutuhkan.

3.7 ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Efisiensi merupakan suatu ukuran keberhasilan yang dinilai dari segi besarnya sumber/biaya untuk mencapai hasil dari kegiatan yang dijalankan. Dalam mengukur efisiensi penggunaan sumberdaya hal yang diukur yaitu :

- **Alokasi Berdasarkan Sasaran Pembangunan**

Berdasarkan alokasi sasaran pembangunan pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Selatan dengan Sasaran Strategis yaitu **“Meningkatnya Kualitas Kompetensi ASN dan Kapabilitas Kelembagaan Diklat”**, alokasi anggaran sebesar Rp. 2.514.392.550,- dan **“Meningkatnya Akutanbilitas Kinerja, Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah”** alokasi anggaran sebesar Rp. 28.376.657.333,- dari total anggaran sebesar Rp. 30.891.049.883,-

- **Pencapaian Kinerja Dan Anggaran**

Pencapaian kinerja dan anggaran diukur berdasarkan perbandingan target kinerja dan anggaran dibandingkan dengan realisasi kinerja dan anggaran dikalikan 100%. Berdasarkan Rencana Kinerja (Renja) tahun 2022 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Selatan dengan Sasaran yakni **“Meningkatnya Kualitas Kompetensi ASN dan Kapabilitas Kelembagaan Diklat”**, dan **“Meningkatnya Akutanbilitas Kinerja, Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah”** yang di bagi menjadi 2 (dua) program yaitu:

- 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dengan alokasi anggaran Rp. 28.376657333,- realisasi Rp. 27.607.498.705,- dengan capaian kinerja 97,29 % ;
- 2. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan alokasi anggaran Rp. 2.514.392.550,- realisasi Rp. 1.961.881.302,- dengan capaian 78,03%.

Dari capaian kerja tersebut didapatkan rerata sebesar 87,66 %.

- **Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya diukur berdasarkan

Formulasi sebagai berikut :

Formulasi Perhitungan	
% Capaian Kinerja - % Penyerapan Anggaran	
% Penyerapan Anggaran	X 100%

Berdasarkan hasil tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.9
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No.	Sasaran Strategis	Program	Indikator Kinerja Utama	Capaian Kinerja	Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Kualitas Kompetensi ASN dan Kapabilitas Kelembagaan Diklat	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase Kualitas Kompetensi ASN dengan Kategori Minimal Baik (skor 70-80)	98,8	78,03	26,61
			Nilai Akreditasi Kelembagaan	101,21		29,70
2	Meningkatnya Akutanbilitas Kinerja, Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Nilai SAKIP Organisasi Perangkat Daerah	95,5	97,29	1,83
			Persentase ASN Nilai SKP Kategori Baik	100		2,78
			Persentase Temuan Material	100		2,78
RERATA				99,10	95,72	3,53

Dari tabel diatas dapat ditunjukkan bahwa tingkat efisiensi terhadap program dan indikatornya yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi dengan 3 indikatornya yaitu Nilai SAKIP Organisasi Perangkat Daerah, Persentase ASN Nilai SKP Kategori Baik, dan Persentase Temuan Material yaitu sebesar 1,83%, 2,78% dan 2,78%.
2. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan 2 indikatornya yaitu Persentase Kualitas Kompetensi ASN dengan Kategori Minimal Baik (skor 70-80), Persentase Nilai Akreditasi Kelembagaan yaitu sebesar 26,61% dan 29,70%,

Secara umum sasaran strategis **Meningkatnya Kualitas Kompetensi ASN dan Kapabilitas Kelembagaan Diklat dan Meningkatnya Akutanbilitas Kinerja, Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah** dengan capaian kinerja sebesar 99,10 % dan capaian anggaran sebesar 95,72 % maka yang dicapai efisiensinya sebesar 3,53 %. Adanya efisiensi ini ini disebabkan semakin taat dan disiplinnya pelaksana kegiatan dan pengelolaan anggaran terhadap aturan dan pedoman pengelolaan kegiatan dan keuangan yang ada.

3.8 ANALISIS PROGRAM / KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAUPUN KEGAGALAN PENCAPAIAN KINERJA

Hasil analisis keberhasilan pencapaian kinerja pada setiap program-program sebagai berikut :

- A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi capaian anggaran sebesar Rp. 27,607,498,705.00,- atau 97,29% dengan realisasi per kegiatan sebagai berikut :

PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI DAN CAPAIAN KINERJA S/D DESEMBER		
		KEUANGAN		% FISIK
		(Rp)	(%)	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	28,376,657,333.00	27,607,498,705.00	97.29	100.00
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	764,334,100.00	669,803,824.00	87.63	100.00
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	20,630,475,232.00	20,463,052,551.00	99.19	100.00
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	558,181,900.00	424,137,156.00	75.99	100.00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	1,244,240,240.00	1,007,142,935.00	80.94	100.00
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	847,364,723.00	841,101,280.00	99.26	100.00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3,563,010,738.00	3,450,312,845.00	96.84	100.00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	769,050,400.0	751,948,114.00	97.78	100.00

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja pada program ini sangat menunjang keberhasilan capaian kinerja secara keseluruhan. Keberhasilan dalam pencapaian kinerja program dan penyerapan anggaran Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi adalah upaya dari seluruh jajaran Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Selatan tetap berkomitmen dan berkewajiban untuk selalu menjaga konsistensi pelaksanaan serta keberlanjutan pembangunan SDM Aparatur di Sulawesi Selatan sesuai kaidahkaidah pelaksanaan Rencana Kerja (RENJA) yang mengacu pada Rencana Strategis (RENSTRA).

B. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia capaian anggaran sebesar Rp. 1,961,881,302.00,- atau 78.03% dengan realisasi per kegiatan sebagai berikut :

PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI DAN CAPAIAN KINERJA S/D DESEMBER		
		KEUANGAN		% FISIK
		(Rp)	(%)	
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	2,514,392,550.00	1,961,881,302.00	78.03	99.13
Pengembangan Kompetensi Teknis	1,372,847,150.00	1,108,929,578.00	80.78	99.47
Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	1,141,545,400.00	852,951,724.00	74.72	98.78

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja pada program ini khususnya pada Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional kurang menunjang keberhasilan capaian kinerja secara keseluruhan.

Belum optimalnya dalam pencapaian kinerja program dan penyerapan anggaran Program Pengembangan Sumber Daya Manusia disebabkan sebagian besar karena adanya

Refocussing Anggaran serta Perubahan Materi dan Jadwal Pembelajaran sehingga setiap kegiatan dan program yang telah direncanakan mengalami banyak kendala terkait dengan jangka waktu pelaksanaan kegiatan pelatihan.

Selain itu beberapa kabupaten/kota di Sulawesi Selatan yang rencananya mengirimkan peserta diklat kepemimpinan maupun diklat prajabatan/latsar tidak jadi mengirimkan dikarenakan terbatasnya anggaran akibat refocusing anggaran yang di gunakan untuk Peningkatan Infrastruktur Pembangunan serta mengembalikan pertumbuhan ekonomi yang lebih stabil.

3.9 REALISASI ANGGARAN

Tahun 2022 merupakan tahun keempat pelaksanaan RPJMD 2018-2023 yang mana pada tahun ini BPSDM Provinsi Sulawesi Selatan menerima pagu anggaran sebesar Rp. 30.891.049.883,- (Tiga Puluh Milyar Delapan Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Empat Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Tiga Rupiah) yang terbagi dalam 2 (dua) program yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi sebesar Rp. 28,376,657,333,- (Dua Puluh Delapan Milyar Tiga Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Enam Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah) dan Program Pengembangan Sumber Daya Manusia sebesar Rp. 2,514,392,550,- (Dua Milyar Lima Ratus Empat Belas Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Lima Ratus Lima Puluh Rupiah). Adapun Penyerapan Anggaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2022 sebagaimana tampak pada tabel berikut :

Tabel 3.10
Realisasi Anggaran Belanja BPSDM Tahun 2022

NAMA ORGANISASI/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI DAN CAPAIAN KINERJA S/D DESEMBER		
		KEUANGAN		% FISIK
		(Rp)	(%)	
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	30.891.049.883,00	29.569.380.007,00	95,72	99,56
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	28.376.657.333,00	27.607.498.705,00	97,29	100,00
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	764.334.100,00	669.803.824,00	87,63	100,00
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	582.271.000,00	491.834.164,00	84,47	100,00
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	30.048.500,00	30.048.500,00	100,00	100,00
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00	100,00
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	12.574.000,00	12.574.000,00	100,00	100,00

NAMA ORGANISASI/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI DAN CAPAIAN KINERJA S/D DESEMBER		
		KEUANGAN		% FISIK
		(Rp)	(%)	
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	21.223.800,00	21.223.800,00	100,00	100,00
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	112.216.800,00	108.123.360,00	96,35	100,00
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	20.630.475.232,00	20.463.052.551,00	99,19	100,00
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	20.094.950.932,00	19.981.783.861,00	99,44	100,00
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	401.333.900,00	351.767.490,00	87,65	100,00
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	20.097.000,00	19.857.000,00	98,81	100,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	46.259.800,00	41.859.800,00	90,49	100,00
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	24.161.300,00	24.161.300,00	100,00	100,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	33.870.300,00	33.870.300,00	100,00	100,00
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	9.802.000,00	9.752.800,00	99,50	100,00
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	558.181.900,00	424.137.156,00	75,99	100,00
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	558.181.900,00	424.137.156,00	75,99	100,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.244.240.240,00	1.007.142.935,00	80,94	100,00
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	53.880.000,00	53.879.732,00	100,00	100,00
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	317.807.800,00	313.782.348,00	98,73	100,00
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	108.528.800,00	108.528.800,00	100,00	100,00
Fasilitasi Kunjungan Tamu	161.495.640,00	131.053.557,00	81,15	100,00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	602.528.000,00	399.898.498,00	66,37	100,00
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	847.364.723,00	841.101.280,00	99,26	100,00
Pengadaan Aset Tak Berwujud	210.000.000,00	209.778.900,00	99,89	100,00

NAMA ORGANISASI/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI DAN CAPAIAN KINERJA S/D DESEMBER		
		KEUANGAN		% FISIK
		(Rp)	(%)	
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	530.814.723,00	527.340.842,00	99,35	100,00
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	106.550.000,00	103.981.538,00	97,59	100,00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.563.010.738,00	3.450.312.845,00	96,84	100,00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.958.071.720,0	1.933.492.310,00	98,74	100,00
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.604.939.018,0	1.516.820.535,00	94,51	100,00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	769.050.400,0	751.948.114,00	97,78	100,00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	219.650.060,00	211.779.770,00	96,42	100,00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	57.540.340,00	51.013.640,00	88,66	100,00
Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	30.000.000,00	29.940.000,00	99,80	100,00
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	274.670.000,00	274.232.604,00	99,84	100,00
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	114.940.000,00	113.000.790,00	98,31	100,00
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	72.250.000,00	71.981.310,00	99,63	100,00
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	2.514.392.550,00	1.961.881.302,00	78,03	99,13
Pengembangan Kompetensi Teknis	1.372.847.150,00	1.108.929.578,00	80,78	99,47
Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	792.948.750,00	719.506.303,00	90,74	100,00
Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	579.898.400,00	389.423.275,00	67,15	98,75

NAMA ORGANISASI/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI DAN CAPAIAN KINERJA S/D DESEMBER		
		KEUANGAN		% FISIK
		(Rp)	(%)	
Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	1.141.545.400,00	852.951.724,00	74,72	98,78
Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	227.619.200,00	162.881.666,00	71,56	100,00
Pelaksanaan Kerjasama Antar Lembaga	101.337.200,00	59.575.292,00	58,79	98,25
Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	537.669.400,00	414.015.166,00	77,00	97,75
Pembinaan,Pengoordinasian,Fasilitasi,Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar,dan Kerjasama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah,Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan	274.919.600,00	216.479.600,00	78,74	100,00

3.10 TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI

Salah satu upaya peningkatan kualitas penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah dengan mempedomani hasil rekomendasi yang diberikan dalam Laporan Hasil Evaluasi pada tahun sebelumnya dan mengimplementasikan dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun selanjutnya. Adapun tindak lanjut hasil evaluasi SAKIP Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Sebagai upaya keberlanjutan manajemen kinerja agar disertai pula dengan pengembangan SDM yang menangani akuntabilitas kinerja baik secara kualitas maupun kuantitas yang mana hal ini telah ditindaklanjuti dengan melakukan pendampingan dalam pelaksanaan penyusunan laporan kinerja. Selain itu juga dilakukan monitoring dan evaluasi ke Bidang-Bidang maupun Sub Bagian di Sekretariat terkait pelaksanaan manajemen kinerja pada unit kerja bersangkutan;
2. Perlu dilakukan pemetaan Kembali atas ukuran kinerja yang digunakan sehingga ukuran kinerja dapat menggambarkan dengan output / outcome yang dihasilkan sesuai dengan kewenangan pada masing-masing levelnya yang mana hal ini dilakukan dengan melakukan proses cek and re-chek dalam penyusunan Perjanjian Kinerja sehingga didapatkan kesepahaman terhadap penetapan kinerja yang dilakukan;
3. Penyusunan cascading kinerja agar lebih komprehensif terkait bagaimana dampak atas pelaksanaan program / kegiatan terhadap capaian sasaran dan menjaga keselarasan antara IKU sampai dengan IKI serta Menyusun penganggaran berbasis

kinerja yang mana hal ini dilakukan dengan mereview pelaksanaan penyusunan cascading kinerja dengan mengakomodir kebutuhan yang timbul dilapangan;

4. Memperkecil kemungkinan deviasi pada pencapaian kinerja, agar memperhatikan keselarasan cascading kinerja dengan peta proses bisnis dan kemungkinan adanya intervensi capaian kinerja dari pihak-pihak terkait yang mana hal ini ditindaklanjuti dengan mengadakan monitoring dan evaluasi terhadap data capaian kinerja baik diberikan oleh Bidang maupun Sekretariat sehingga apabila ditemukan deviasi dapat segera direvisi;
5. Monitoring dan evaluasi implementasi akuntabilitas kinerja agar dapat dilakukan secara terus menerus sehingga dapat meminimalisir kesenjangan pemahaman manajemen kinerja yang mana hal ini merupakan agenda rutin yang dilaksanakan baik dalam bentuk pelaksanaan kegiatan rapat koordinasi maupun melalui grup WhatsApp sehingga koordinasi dapat terus dilakukan;
6. Melaksanakan pengukuran kinerja secara berkala untuk mendeteksi lebih awal upaya pencapaian kinerja dan dapat dikembangkan dengan aplikasi yang mana hal ini telah ditindaklanjuti dengan pembuatan aplikasi **E-CORE (Elektronik Controlling and Reporting)** yang mulai diterapkan implementasinya sejak triwulan IV Tahun 2022;
7. Berupaya untuk menciptakan inovasi perbaikan atas implementasi SAKIP yang mana hal ini dilakukan dengan mendorong tiap Unit Kerja dilingkungan BPSDM Provinsi Sulawesi Selatan untuk menciptakan inovasi sesuai bidang tugas yang dimiliki;
8. Memperhatikan dan menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi yang diberikan, sebagai umpan balik perbaikan perencanaan kinerja, penerapan manajemen kinerja dan peningkatan capaian kinerja yang mana hal ini telah ditindaklanjuti dengan memasukkan agenda implementasi SAKIP dalam pelaksanaan rapat khususnya dilingkungan pejabat struktural BPSDM Provinsi Sulawesi Selatan.

BAB IV

PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja ini merupakan wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2022 yang mengacu pada dokumen Rencana Kinerja/Perjanjian Kinerja yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis. Perjanjian Kinerja yang berisi target-target kinerja pada hakikatnya merupakan kontrak kinerja yang harus dicapai dan alokasi sumber daya keuangan (anggaran) yang digunakan. Kontrak Kinerja tersebut pada akhir tahun harus dipertanggungjawabkan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).

Adanya refocusing anggaran telah memaksa perubahan dalam berbagai aspek kehidupan termasuk didalamnya pengembangan kompetensi aparatur. Untuk itu BPSDM Provinsi Sulawesi Selatan telah mengimplementasikan metode yang sesuai dengan perubahan situasi yang ada. Hal ini diwujudkan dalam bentuk diversifikasi pelaksanaan kegiatan pengembangan kompetensi yaitu dalam bentuk klasikal, non klasikal maupun blended. Output dari penerapan ini adalah tercapainya target kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja/Perjanjian Kinerja khususnya yang dibiayai sepenuhnya oleh APBD Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Untuk kegiatan yang dibiayai oleh mekanisme Retribusi Pelayanan Pendidikan pada umumnya telah mampu mencapai target yang telah ditetapkan. Secara umum pelaksanaan Program Pengembangan Kompetensi Aparatur Tahun 2022 di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Selatan dapat mencapai target kinerja yang telah ditetapkan pada tahun 2022. Hal ini terbukti dengan capaian kinerja dalam Laporan Evaluasi Triwulan IV Tahun 2022 yang menyebutkan rerata capaian kinerja sebesar 99,10 % dan realisasi anggaran sebesar 87,66 %. Keberhasilan merealisasikan target kinerja merupakan wujud dari kepercayaan pemangku kepentingan dan pengguna jasa kepada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Selatan untuk terus menyelenggarakan pengembangan kompetensi yang sesuai dengan tuntutan perubahan dalam rangka pemenuhan kebutuhan SDM yang berkualitas yang memiliki kompetensi, dedikasi dan integritas yang tinggi untuk keberlanjutan pembangunan SDM Aparatur di Sulawesi Selatan.

4.2 SARAN

Untuk mengoptimalkan kinerja dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi aparatur ke depan, perlu lebih ditekankan pada pencapaian outcomes dan benefit, serta langkah-langkah antisipatif yang perlu dilakukan di masa yang akan datang antara lain :

1. Menyempurnakan, mengembangkan dan meningkatkan kualitas program, dengan melakukan inovasi terhadap jenis-jenis pelatihan baru, kurikulum yang berkualitas disesuaikan dengan kebutuhan akan peningkatan kompetensi;
2. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelatihan dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dalam berbagai aspek;
3. Meningkatkan kompetensi SDM Kediklatan di Lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Selatan guna meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelatihan;
4. Secara konsisten dan berkelanjutan melakukan perbaikan atau penyempurnaan penyelenggaraan pelatihan baik menyangkut materi, metode maupun sarana prasarananya;
5. Meningkatkan aktivitas pengendalian dan melakukan pengawasan serta monitoring secara terus menerus atas semua kegiatan;
6. Mengintensifkan konsultasi, koordinasi dengan pengelola kediklatan baik dengan instansi pembina diklat (pusat), provinsi maupun kabupaten/kota serta;
7. Mengembangkan *Corporate University (Corpu)* untuk pelatihan Non Klasikal Aparatur Sipil Negara;
8. Mengembangkan proses pembelajaran berbasis IT untuk mendukung pengembangan kompetensi Aparatur Sipil Negara;
9. Membuka jejaring yang lebih luas untuk peningkatan kapasitas lembaga baik dengan Lembaga Pemerintah ataupun swasta dalam seluruh aspek penyelenggaraan kegiatan pengembangan kompetensi.

Kepala Badan,



Prof. Dr. Muhammad Jufri, M.Si, M.Psi, Psikolog

Pangkat : Pembina Utama Madya

NIP : 19680202 199403 1 009

LAMPIRAN

Aplikasi E-CORE (Elektronik Controlling and Reporting) BPSDM Provinsi Sulawesi Selatan

← → ↺

https://ecore.bpsdmsulselprov.e-planning.id/contents/admin/#/laporancapaiankinerja

☆ 🔍 Cari

🔒 📄 🌐

ECORE BPSDM

📁 Pendapatan

📊 Fisik & Keuangan

📍 Progress Paket Fisik

🔗 Progress Non Fisik

📦 Syncon e-Monev

LAPORAN

🖨️ Peny. Urusan

🖨️ PK & Capaian Kinerja

🖨️ Realisasi

USERS SISTEM

👤 Daftar User

👤 Aktivasi Eselon

Tahun Anggaran 2022

🔍 badan.psdm Administrator

Laporan Capaian Kinerja

Perjanjian Kinerja

Evaluasi Renja

Eselon	Jabatan	Pilihan	Cetak
Eselon 2	Kepala Dinas/Badan		🖨️
Eselon 3	Kepala Bidang/Unit	Pilih Bidang/ UPT/ Unit...	🖨️
Eselon 4	Kepala Subbidang/Subunit	Pilih Subbidang/ SubUnit...	🖨️

Activate Windows
Go to Settings to activate Windows.

COPYRIGHT © 2022 BPSDM, All rights Reserved

e-CORE Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Prov.Sulsel

👤 1

REALISASI DAN CAPAIAN KINERJA SAMPAI DENGAN BULAN DESEMBER TAHUN 2022
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

NAMA ORGANISASI/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	SATUAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI DAN CAPAIAN KINERJA TRIWULAN IV					SISA ANGGARAN YANG BELUM DICAIRKAN	(%)
					KEUANGAN		% FISIK	KINERJA	CAPAIAN		
					(Rp)	(%)					
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA				30.891.049.883,00	29.569.380.007,00	95,72	99,56			1.321.669.876,00	4,28
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Penurunan Temuan berdasarkan LHP	0,1	Persen	28.376.657.333,00	27.607.498.705,00	97,29	100,00	0,01	100,00	769.158.628,00	2,71
	Persentase Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah	98	Persen					98,72	100,73		
	Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Baik dan Sangat Baik	98	Persen					98,02	100,02		
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	Persen	764.334.100,00	669.803.824,00	87,63	100,00	102,78	102,78	94.530.276,00	12,37
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Peserta Forum Perangkat Daerah	88	Orang	582.271.000,00	491.834.164,00	84,47	100,00	90	102,27	90.436.836,00	15,53
	Jumlah Dokumen Renstra PD yang disusun dan ditetapkan	2	Dokumen					1	50,00		
	Jumlah Dokumen Evaluasi PD yang tersusun dan dilaporkan	4	Dokumen					4	100,00		
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA - SKPD yang tersedia	1	Dokumen	30.048.500,00	30.048.500,00	100,00	100,00	1	100,00	0,00	0,00
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA - SKPD yang tersedia	1	Dokumen	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00	100,00	1	100,00	0,00	0,00
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang disusun	1	Dokumen	12.574.000,00	12.574.000,00	100,00	100,00	1	100,00	0,00	0,00
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD yang disusun	1	Dokumen	21.223.800,00	21.223.800,00	100,00	100,00	1	100,00	0,00	0,00
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Data & Informasi yang dikumpulkan dan terpublikasi	10	Laporan	112.216.800,00	108.123.360,00	96,35	100,00	12	120,00	4.093.440,00	3,65
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	Persen	20.630.475.232,00	20.463.052.551,00	99,19	100,00	109,52	109,52	167.422.681,00	0,81
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang tersedia	134	Orang	20.094.950.932,00	19.981.783.861,00	99,44	100,00	134	100,00	113.167.071,00	0,56
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan	1	Dokumen	401.333.900,00	351.767.490,00	87,65	100,00	1	100,00	49.566.410,00	12,35
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Laporan akuntansi keuangan SKPD	12	Laporan	20.097.000,00	19.857.000,00	98,81	100,00	14	116,67	240.000,00	1,19
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan keuangan akhir tahun SKPD yang disusun	2	Laporan	46.259.800,00	41.859.800,00	90,49	100,00	3	150,00	4.400.000,00	9,51
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Laporan Keuangan bahan tanggapan pemeriksa yang disusun	4	Laporan	24.161.300,00	24.161.300,00	100,00	100,00	4	100,00	0,00	0,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/Triwulan/ semesteran SKPD yang disusun	3	Laporan	33.870.300,00	33.870.300,00	100,00	100,00	3	100,00	0,00	0,00
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan Prognosis Realisasi anggaran yang disusun	4	Laporan	9.802.000,00	9.752.800,00	99,50	100,00	4	100,00	49.200,00	0,50
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	Persen	558.181.900,00	424.137.156,00	75,99	100,00	100,00	100,00	134.044.744,00	24,01
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Aparat OPD yang kelola administrasi kepegawaiannya	134	Orang	558.181.900,00	424.137.156,00	75,99	100,00	134	100,00	134.044.744,00	24,01
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	Persen	1.244.240.240,00	1.007.142.935,00	80,94	100,00	103,58	103,58	237.097.305,00	19,06
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	5	Unit	53.880.000,00	53.879.732,00	100,00	100,00	5	100,00	268,00	0,00
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang tersedia	80	Unit	317.807.800,00	313.782.348,00	98,73	100,00	85	106,25	4.025.452,00	1,27

NAMA ORGANISASI/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	SATUAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI DAN CAPAIAN KINERJA TRIWULAN IV					SISA ANGGARAN YANG BELUM DICAIRKAN	(%)
					KEUANGAN		% FISIK	KINERJA	CAPAIAN		
					(Rp)	(%)					
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah ATK , barang cetakan dan penggandaan	30	Jenis	108.528.800,00	108.528.800,00	100,00	100,00	32	106,67	0,00	0,00
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah biaya jamuan makan dan minum yang tersedia	40	Jenis	161.495.640,00	131.053.557,00	81,15	100,00	42	105,00	30.442.083,00	18,85
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah perjalanan dinas koordinasi dan konsultasi (Kab/Kota se sulsel instansi pembina)	24	Kab/Kota se sulsel instansi pembina	602.528.000,00	399.898.498,00	66,37	100,00	24	100,00	202.629.502,00	33,63
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	Persen	847.364.723,00	841.101.280,00	99,26	100,00	100,00	100,00	6.263.443,00	0,74
Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwwujud yang disediakan	2	Unit	210.000.000,00	209.778.900,00	99,89	100,00	2	100,00	221.100,00	0,11
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah gedung dan bangunan kantor yang diadakan	1	Tahun	530.814.723,00	527.340.842,00	99,35	100,00	1	100,00	3.473.881,00	0,65
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang tersedia	3	Unit	106.550.000,00	103.981.538,00	97,59	100,00	3	100,00	2.568.462,00	2,41
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	Persen	3.563.010.738,00	3.450.312.845,00	96,84	100,00	100,00	100,00	112.697.893,00	3,16
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah biaya tagihan telepon, air dan listrik, internet dan retribusi sampah	12	Bulan	1.958.071.720,0	1.933.492.310,00	98,74	100,00	12	100,00	24.579.410,00	1,26
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa pelayanan umum kantor	45	Orang	1.604.939.018,0	1.516.820.535,00	94,51	100,00	45	100,00	88.118.483,00	5,49
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	Persen	769.050.400,0	751.948.114,00	97,78	100,00	102,65	102,65	17.102.286,00	2,22
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan jabatan/dinas yang dipelihara	13	Unit	219.650.060,00	211.779.770,00	96,42	100,00	13	100,00	7.870.290,00	3,58
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah pajak kendaraan dinas/operasional Roda 2 yang terbayarkan	6	Unit	57.540.340,00	51.013.640,00	88,66	100,00	6	100,00	6.526.700,00	11,34
	Jumlah pajak kendaraan dinas/operasional Roda 4 yang terbayarkan	7	Unit					7	100,00		
Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset tak berwujud yang dipelihara	3	Aplikasi	30.000.000,00	29.940.000,00	99,80	100,00	3	100,00	60.000,00	0,20
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung dan bangunan kantor yang dipelihara	40	Unit	274.670.000,00	274.232.604,00	99,84	100,00	42	105,00	437.396,00	0,16
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasana gedung kantor yang dipelihara	140	Unit	114.940.000,00	113.000.790,00	98,31	100,00	145	103,57	1.939.210,00	1,69
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasana Pendukung gedung kantor yang dipelihara	20	Unit	72.250.000,00	71.981.310,00	99,63	100,00	22	110,00	268.690,00	0,37
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Cakupan SDM Aparatur yang Lulus Diklat Kompetensi Managerial, Kompetensi Diklat Fungsional, Kompetensi Diklat Sosial Kultural	100	Persen	2.514.392.550,00	1.961.881.302,00	78,03	99,13	105,51	105,51	552.511.248,00	21,97
Pengembangan Kompetensi Teknis	Persentase Pengembangan Kompetensi Teknis	100	Persen	1.372.847.150,00	1.108.929.578,00	80,78	99,47	107,38	107,38	263.917.572,00	19,22
Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Peserta yang mengikuti pelatihan Revolusi Mental	30	Orang	792.948.750,00	719.506.303,00	90,74	100,00	35	116,67	73.442.447,00	9,26
	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan pemerintahan	55	Orang					60	109,09		
	Jumlah Peserta yang mengikuti pelatihan teknis	159	Orang					165	103,77		
Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, danPelaporanPengembangan Kompetensi Teknisumum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Kab./Kota yang difasilitasi diklat Teknis, Fungsional dan Pemerintahan	24	Kab/Kota se sulsel instansi pembina	579.898.400,00	389.423.275,00	67,15	98,75	24	100,00	190.475.125,00	32,85

NAMA ORGANISASI/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	SATUAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI DAN CAPAIAN KINERJA TRIWULAN IV					SISA ANGGARAN YANG BELUM DICAIRKAN	(%)
					KEUANGAN		% FISIK	KINERJA	CAPAIAN		
					(Rp)	(%)					
Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Persentase Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	100	Persen	1.141.545.400,00	852.951.724,00	74,72	98,78	103,64	103,64	288.593.676,00	25,28
Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	Jumlah Sertifikasi Akreditasi Lembaga Daerah dan standar penyelenggaraan pelatihan	3	Dokumen	227.619.200,00	162.881.666,00	71,56	100,00	3	100,00	64.737.534,00	28,44
	Jumlah Peserta/Workshop Peningkatan Kapasitas SDM Melalui ASN Corporate University	25	Orang					30	120,00		
Pelaksanaan Kerjasama Antar Lembaga	Jumlah Kerjasama Luar/Dalam Negeri/Lembaga/Pemerintah Daerah	6	MOU/PKS	101.337.200,00	59.575.292,00	58,79	98,25	6	100,00	41.761.908,00	41,21
	Jumlah Peserta Sosialisasi/Seminar/Workshop Kerjasama	55	Orang					60	109,09		
Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan kepemimpinan	30	Orang	537.669.400,00	414.015.166,00	77,00	97,75	30	100,00	123.654.234,00	23,00
	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan Latsar	180	Orang					180	100,00		
	Jumlah Peserta yang mengikuti Pelatihan fungsional	100	Orang					100	100,00		
Pembinaan,Pengoordinasian,Fasilitasi,Pemantauan, Evaluasi,dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi,Pengelolaan Sumber Belajar,dan Kerjasama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah,Jabatan Pimpinan Tinggi,Kepemimpinan dan Prajabatan	Jumlah Kab./kota yang difasilitasi diklat Revmen,kepemimpinan dan latsar	24	Kab/Kota se sulsel instansi pembina	274.919.600,00	216.479.600,00	78,74	100,00	24	100,00	58.440.000,00	21,26



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
(BPSDM)**

Jl. Cendrawasi NO. 233 MAKASSAR, TLP/FAX (0411) 876223

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **DRS. H. ASRI SAHRUN SAID**

Jabatan : Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Selatan

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama.**

Nama : **ANDI SUDIRMAN SULAIMAN, ST**

Jabatan : Plt. Gubernur Sulawesi Selatan

Selaku Atasan Langsung Pihak Pertama, Selanjutnya disebut **Pihak Kedua.**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Makassar, Januari 2022

Pihak Kedua,

ANDI SUDIRMAN SULAIMAN, ST

Pihak Pertama,

DRS. H. ASRI SAHRUN SAID

Pangkat : Pembina Utama Madya
NIP. 19671203 199403 1 009

**PERJANJIAN KINERJA
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PROVINSI SULAWESI SELATAN
TAHUN 2022**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya Kualitas Kompetensi ASN dan Kapabilitas Kelembagaan Diklat	Persentase Kualitas Kompetensi ASN dengan Kategori Minimal Baik (skor 70-80)	85%
		Kualitas Pengelolaan Kelembagaan dan Sertifikasi Kompetensi	82 Nilai (Kategori A)
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja, Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Organisasi Perangkat Daerah	85 Nilai (Kategori A)
		Persentase ASN Nilai SKP Kategori Baik	98%
		Persentase Temuan Material	0,10%

No.	Program	Anggaran	Keterangan
1	2	3	4
1.	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia (Prioritas)	Rp 3.010.501.000	APBD
2.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Kp 27.606.968.648	APBD
	Total	Rp 30.617.569.648	

Makassar, Januari 2022

Gubernur Sulawesi Selatan

ANDI SUDIRMAN SULAIMAN, ST

Kepala BPSDM
Provinsi Sulawesi Selatan

Drs. H. Asri Sahrun Said
Pangkat : Pembina Utama Madya
NIP. 19671203 199403 1 009



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
(BPSDM)**

Jl. Cendrawasi NO. 233 MAKASSAR, TLP/FAX (0411) 876223

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **ZUHAERA ZUBIR, SE, MM**

Jabatan : Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Selatan

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

Nama : **DRS. H. ASRI SAHRUN SAID**

Jabatan : Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Selatan

Selaku Atasan Langsung Pihak Pertama, Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Makassar, Januari 2022

Pihak Kedua,

DRS. H. ASRI SAHRUN SAID
Pangkat : Pembina Utama Madya
NIP. 19671203 199403 1 009

Pihak Pertama,

ZUHAERA ZUBIR, SE, MM
Pangkat : Pembina Tk.I
NIP. 197305021997032005

PERJANJIAN KINERJA
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PROVINSI SULAWESI SELATAN
TAHUN 2022

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja BPSDM	Persentase Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah	100%
		Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Baik	100%
		Persentase Penurunan Temuan Berdasarkan LHP	0,10%

No.	Program/Kegiatan	Anggaran
1	2	3
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp 27.606.968.648,00
-	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 679.241.300,00
-	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 20.862.192.601,00
-	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp 336.912.900,00
-	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 884.981.640,00
-	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp 112.817.723,00
-	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp 3.816.845.430,00
-	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 913.977.054,00

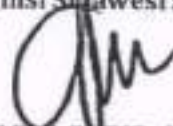
Makassar, Januari 2022

Kepala BPSDM
Provinsi Sulawesi Selatan



DRS. H. ASRI SAHRUN SAID
Pangkat : Pembina Utama Madya
NIP. 19671203 199403 1 009

Sekretaris BPSDM
Provinsi Sulawesi Selatan



ZUHAERA ZUBIR, SE, MM
Pangkat : Pembina Tk.I
NIP. 197305021997032005



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
(BPSDM)

Jl. Cendrawasi NO. 233 MAKASSAR, TLP/FAX (0411) 876223

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **NUR AWAL, S.STP, M.SI**

Jabatan : Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial Badan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Selatan

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

Nama : **DRS. H. ASRI SAHRUN SAID**

Jabatan : Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi
Selatan

Selaku Atasan Langsung Pihak Pertama, Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Makassar, Januari 2022

Pihak Kedua,

DRS. H. ASRI SAHRUN SAID
Pangkat : Pembina Utama Madya
NIP. 19671203 199403 1 009

Pihak Pertama,

NUR AWAL, S.STP, M.SI
Pangkat : Pembina
NIP. 198610262004121001

PERJANJIAN KINERJA
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PROVINSI SULAWESI SELATAN
TAHUN 2022

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya Kualitas Kompetensi ASN dengan Kategori Minimal Baik (skor 70-80)	Persentase Kualitas Kompetensi Manajerial ASN dengan Kualifikasi Kelulusan Minimal Baik (skor 70-80)	100%

No.	Program/Kegiatan	Anggaran
1	2	3
1.	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Rp 740.797.300,00
-	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Rp 740.797.300,00

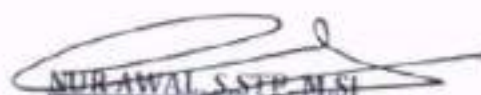
Makassar, Januari 2022

Kepala BPSDM
Provinsi Sulawesi Selatan



DRS. H. ASRI SAHRUN SAID
Pangkat : Pembina Utama Madya
NIP. 19671203 199403 1 009

Kabid. Pengembangan
Kompetensi Manajerial



NUR AWAL S. STP. M.Si
Pangkat : Pembina
NIP. 198610262004121001



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
(BPSDM)

Jl. Cendrawasi NO. 233 MAKASSAR, TLP/FAX (0411) 876223

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **DR. BUANA, S.PD, M.PD**

Jabatan : Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis Umum dan Fungsional
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Selatan

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

Nama : **DRS. H. ASRI SAHRUN SAID**

Jabatan : Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Selatan

Selaku Atasan Langsung Pihak Pertama, Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja menjadi tanggung jawab kami.

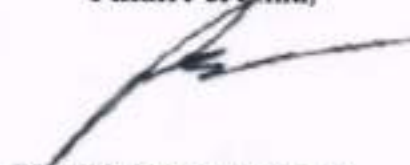
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Makassar, Januari 2022

Pihak Kedua,


DRS. H. ASRI SAHRUN SAID
Pangkat : Pembina Utama Madya
NIP. 19671203 199403 1 009

Pihak Pertama,


DR. BUANA, S.PD, M.PD
Pangkat : Pembina Tk I
NIP. 197102031996021001

PERJANJIAN KINERJA
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PROVINSI SULAWESI SELATAN
TAHUN 2022

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya Kualitas Kompetensi ASN dengan Kategori Minimal Baik (skor 70-80)	Persentase Kualitas Kompetensi Teknis ASN dengan Kualifikasi Kelulusan Minimal Baik (skor 70-80)	100%
		Persentase Kualitas Kompetensi Fungsional ASN dengan Kualifikasi Kelulusan Minimal Baik (skor 70-80)	100%

No.	Program/Kegiatan	Anggaran
1	2	3
1.	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Rp 949.097.100,00
-	Pengembangan Kompetensi Teknis	Rp 588.786.850,00
-	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Rp 360.310.250,00

Makassar, Januari 2022

Kepala BPSDM
Provinsi Sulawesi Selatan



DRS. H. ASRI SAHRUN SAID
Pangkat : Pembina Utama Madya
NIP. 19671203 199403 1 009

Kabid. Pengembangan
Kompetensi Teknis Umum dan
Fungsional



DR. BAYANA, S.PD. M.PD
Pangkat : Pembina Tk.I
NIP. 197102031996021001



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
(BPSDM)**

Jl. Cendrawasih No. 233 MAKASSAR, TLP/FAX (0411) 876223

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **HJ. NUR ENI YAHYA, S.SOS. MM**

Jabatan : Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis Inti Badan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Selatan

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

Nama : **DRS. H. ASRI SAHRUN SAID**

Jabatan : Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi
Selatan

Selaku Atasan Langsung Pihak Pertama, Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Makassar, Januari 2022

Pihak Kedua,


DRS. H. ASRI SAHRUN SAID
Pangkat : Pembina Utama Madya
NIP. 19671203 199403 1 009

Pihak Pertama,


HJ. NUR ENI YAHYA, S.SOS. MM
Pangkat : Pembina TKI
NIP. 197408041995032001

PERJANJIAN KINERJA
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PROVINSI SULAWESI SELATAN
TAHUN 2022

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
I	Meningkatnya Kualitas Kompetensi ASN dengan Kategori Minimal Baik (skor 70-80)	Persentase Kualitas Kompetensi Teknis Inti ASN dengan Kualifikasi Kelulusan Minimal Baik (skor 70-80)	100%

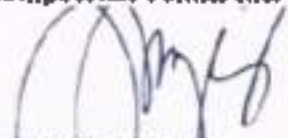
No.	Program/Kegiatan	Anggaran
1	2	3
1.	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Rp 690.502.200,00
-	Pengembangan Kompetensi Teknis	Rp 690.502.200,00

Makassar, Januari 2022

Kepala BPSDM
Provinsi Sulawesi Selatan


DRS. H. ASRI SAHRUN SAID
Pangkat : Pembina Utama Madya
NIP. 19671203 199403 1 009

Kabid. Pengembangan
Kompetensi Teknis Inti


HJ. NURENI YAHYA, S.SOS, MM
Pangkat : Pembina Tk.I
NIP. 197408041995032001



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
(BPSDM)

(L. Candrawasi NO. 233 MAKASSAR, TLP/FAX (0411) 876223

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **H. FAHLEVI YUSUF, S.SOS**

Jabatan : Kepala Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Pengolaan Kelembagaan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Selatan

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

Nama : **DRS. H. ASRI SAHRUN SAID**

Jabatan : Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Selatan

Selaku Atasan Langsung Pihak Pertama, Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Makassar, Januari 2022

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

DRS. H. ASRI SAHRUN SAID

Pangkat: Pembina Utama Madya
NIP. 19671203 199403 1 009

H. FAHLEVI YUSUF, S.SOS

Pangkat: Pembina
NIP. 1976062619951111001

**PERJANJIAN KINERJA
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PROVINSI SULAWESI SELATAN
TAHUN 2022**

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Kelembagaan dan Sertifikasi Kompetensi	Status Akreditasi Kelembagaan (Skor 80,1-90)	82 Nilai (Akreditasi A)
		Status Sertifikasi Kompetensi ASN (Skor 80,1-90)	82 Nilai (Akreditasi A)

No.	Program/Kegiatan	Anggaran
1	2	3
1.	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	630.134.400,00
-	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	630.134.400,00

Makassar, Januari 2022

Kepala BPSDM
Provinsi Sulawesi Selatan

DRS. H. ASRI SAHRUN SAID
Pangkat: Pembina Utama Madya
NIP. 19671203 199403 1 009

Kabid. Sertifikasi Kompetensi
dan Kelembagaan

EL FAHLEVI YUSUF, S.SOS
Pangkat: Pembina
NIP. 197606261995111001



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
(BPSDM)**

[L. Cendrawasi] NO. 233 MAKASSAR, TLP/FAX (0411) 876223

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **ARIES ZAINUDDIN TAHIR, S.KOM, MM**

Jabatan : Kepala Sub Bagian Program Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Provinsi Sulawesi Selatan

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

Nama : **ZUHAERA ZUBIR, SE, MM**

Jabatan : Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi
Sulawesi Selatan

Selaku Atasan Langsung Pihak Pertama, Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Makassar, Januari 2022

Pihak Kedua,

ZUHAERA ZUBIR, SE, MM

Pangkat : Pembina Tk.I

NIP. 19730502 199703 2 005

Pihak Pertama,

ARIES ZAINUDDIN TAHIR, S.KOM, MM

Pangkat : Penata Tk.I

NIP. 19820414 200903 1 005

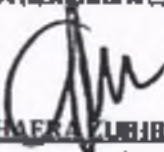
PERJANJIAN KINERJA
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PROVINSI SULAWESI SELATAN
TAHUN 2022

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya Kesesuaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen
		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen
		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen
		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen
		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Laporan

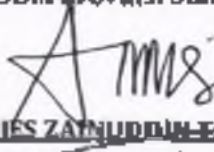
No.	Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran
1	2	3
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 679.241.300,00
-	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp 490.222.800,00
-	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Rp 23.997.500,00
-	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Rp 6.000.000,00
-	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Rp 12.574.000,00
-	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Rp 21.856.500,00
-	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 124.590.500,00

Makassar, Januari 2022

Sekretaris BPSDM
Provinsi Sulawesi Selatan


ZUHAIRA ZUHIR, SE, MM
 Pangkat: Pembina Tk.I
 NIP. 19730502 199703 2 005

Kasubag. Program
BPSDM Provinsi Sulawesi Selatan


ARIES ZAINUDDIN FAHIR, S.Kom, Mh
 Pangkat: Penata Tk.I
 NIP. 19820414 200903 1 005



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
(BPSDM)**

Jl. Cendrawasi NO. 233 MAKASSAR, TLP/FAX (0411) 876223

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **SIAHDARA,S.SOS**

Jabatan : Kepala Sub Bagian Keuangan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Selatan

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

Nama : **ZUHAERA ZUBIR, SE, MM**

Jabatan : Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Selatan

Selaku Atasan Langsung Pihak Pertama, Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Makassar, Januari 2022

Pihak Kedua,

ZUHAERA ZUBIR, SE, MM

Pangkat : Pembina Tk.I

NIP. 19730502 199703 2 005

Pihak Pertama,

SIAHDARA,S.SOS

Pangkat : Penata Tk.I

NIP. 19640901 198603 2 021

**PERJANJIAN KINERJA
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PROVINSI SULAWESI SELATAN
TAHUN 2022**

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya Kesesuaian Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	134 Orang
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan
		Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	2 Dokumen
		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan / Semesteran SKPD	3 Laporan
		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	4 Dokumen

No.	Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran
1	2	3
1.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 20.862.192.601,00
-	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 20.334.781.201,00
-	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Rp 391.533.000,00
-	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Rp 20.487.000,00
-	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp 46.504.800,00
-	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Rp 24.473.300,00
-	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Rp 34.260.300,00
-	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Rp 10.153.000,00

Makassar, Januari 2022

Sekretaris BPSDM
Provinsi Sulawesi Selatan

ZUNAERA KUBIR, SE, MM
Pangkat : Pembina Tk.I
NIP. 19730502 199703 2 005

Kasubag. Keuangan
BPSDM Provinsi Sulawesi Selatan

SIHADARA SOS
Pangkat : Penata Tk.I
NIP. 19640901 198603 2 021



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
(BPSDM)**

JL. Cendrawasih NO. 233 MAKASSAR, TLP/FAX (0411) 876223

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **AMBO MAI, SE**

Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Hukum Badan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Selatan

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

Nama : **ZUHAERA ZUBIR, SE, MM**

Jabatan : Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi
Sulawesi Selatan

Selaku Atasan Langsung Pihak Pertama, Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Makassar, Januari 2022

Pihak Kedua,

ZUHAERA ZUBIR, SE, MM
Pangkat : Pembina Tk.I
NIP. 19730502 199703 2 005

Pihak Pertama,

AMBO MAI, SE
Pangkat : Penata Tk.I
NIP. 19680706 200801 1 017

PERJANJIAN KINERJA
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PROVINSI SULAWESI SELATAN
TAHUN 2022

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya Kesesuaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	4 Dokumen
	Meningkatnya Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Unit Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Unit
		Jumlah Unit Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	40 Unit
		Jumlah Jenis Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	15 Jenis
		Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	20 Laporan
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Laporan
	Meningkatnya Kuantitas Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit
	Meningkatnya Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan
	Meningkatnya Kualitas Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Perotangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	13 Unit
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13 Unit
		Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	3 Aplikasi
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Gedung
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	140 Sarana
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	20 Sarana

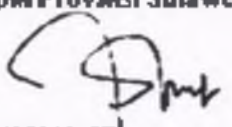
No.	Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran
1	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp 336.912.900,00
-	Pendaftaran dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Rp 336.912.900,00
2	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 884.981.640,00
-	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp 53.880.000,00
-	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp 313.997.800,00
-	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp 34.385.000,00
-	Facilitasi Kunjungan Tamu	Rp 161.495.640,00
-	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp 321.223.200,00
3	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 112.817.723,00
-	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp 112.817.723,00
4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 3.816.845.430,00
-	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp 2.203.296.468,00
-	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp 1.613.548.962,00
5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 913.977.054,00
-	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp 277.165.680,00
-	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp 88.618.384,00
-	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Rp 30.000.000,00
-	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp 130.620.000,00
-	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp 327.572.990,00
-	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp 60.000.000,00

Makassar, Januari 2022

Sekretaris BPSDM
Provinsi Sulawesi Selatan


ZUHAIRI ZUHIR, SE. MM
Pangkat : Pembina Tk.I
NIP. 197305021997032005

Kasubag. Umum dan Kepegawaian
BPSDM Provinsi Sulawesi Selatan


AMBUL MAL, SE
Pangkat : Penata Tk.I
NIP. 19680706 200801 1 017



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Jendral Urip Sumoharjo No. 2fB, Telpon (0411)-424780, 453186,
453187

MA K A S S A R 90231

BERITA ACARA

**KONSULTASI DAN PENYAMPAIAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PROVINSI SULAWESI
SELATAN TA. 2022**

Pada hari Rabu Tanggal 23 Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, Berdasarkan PP nornor 8 Tahun 2006 tentang sistern Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Mentri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang juknis perjanjian Kinerja, pelaporan Kinerja dan tata cara reviu atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Maka telah dilakukan pemeriksaan dan pelaporan atas kinerja Instansi Pemerintah yang dituangkan dalam bentuk Laporan LKj Pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Selatan yang telah di serahkan dan di laporkan kepada Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

DemikianJah Serita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang
Menyerahkan

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia



Aries Zarnuiddin Tahir S.Kom.
MM NIP. 19⁸20414 200903 1 005

Yang Menerima

Biro Organisasi Sekretariat
Daerah



Suryani Aras, ST
NIP. 19710329 199309 2 001